

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 mengacu pada prioritas nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah. Pemilihan prioritas disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Kebumen dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di mana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Sehubungan dengan itu, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen pada Tahun 2009, difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan keadaan yang lebih aman, adil dan demokratis, antara lain :

- A. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan serta Peningkatan Upaya Perlindungan Sosial. Sasaran penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan serta peningkatan upaya perlindungan sosial antara lain :
 - 1. terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
 - 2. terwujudnya percepatan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang masih tertinggal; dan
 - 3. perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- B. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Umum Pemerintahan. Sasaran peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan umum pemerintahan meliputi pelayanan umum pemerintahan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan bidang lainnya sampai akhir Tahun 2009 diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat melalui peningkatan akses, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, antara lain :

1. meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dilihat dari semakin meningkatnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan semakin meningkatnya nilai kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintahan;
 2. meningkatnya kuantitas penduduk yang dapat mengakses pelayanan pendidikan yang diukur dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
 3. meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan penduduk miskin serta antara penduduk laki-laki dan perempuan;
 4. meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan;
 5. meningkatnya kemandirian sekolah melalui manajemen berbasis sekolah, peran serta masyarakat serta perbaikan proses pembelajaran;
 6. meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat;
 7. meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik dari Puskesmas, rumah sakit, maupun tenaga kesehatan terlatih;
 8. menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit serta menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita; dan
 9. meningkatnya ketersediaan obat esensial di berbagai institusi kesehatan.
- C. Rehabilitasi dan Pembangunan Infrastruktur. Sasaran rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, antara lain :
1. berkurangnya tingkat kerusakan jalan dan jembatan dengan upaya pemeliharaan jalan dan jembatan;
 2. meningkatnya prasarana dan sarana transportasi termasuk kualitas jalan dan jembatan kabupaten, jalan tembus antar kabupaten, jalan lintas propinsi serta pengembangan sistem transportasinya;
 3. terjaganya tingkat layanan irigasi bagi petani;
 4. berkurangnya lama dan luas genangan baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan; dan

5. meningkatnya kualitas fasilitas umum termasuk wajah kota dan ruang terbuka hijau.

D. Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, sasaran Revitalisasi Pertanian dan Perdesaan, meliputi :

1. tercapainya pertumbuhan pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan;
2. terciptanya lapangan kerja di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; dan
3. meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas kerja.

E. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, sasaran yang hendak dicapai pada Tahun 2009 adalah menekan laju pertumbuhan pengangguran terbuka dari 35% (tiga puluh lima persen) per tahun menjadi 25% (dua puluh lima persen) per tahun dari pertumbuhan angkatan kerja, meningkatkan investasi sebesar 8,7% (delapan koma tujuh persen) pada Tahun 2007 menjadi 8,8% (delapan koma delapan persen) pada Tahun 2008.

Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan tersebut di atas, dibagi dalam 2 (dua) kewenangan urusan, yaitu :

- A. Kewenangan Urusan Wajib, meliputi : Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Statistik, Kearsipan serta Komunikasi dan Informatika;
- B. Kewenangan Urusan Pilihan, meliputi : Urusan Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian serta Transmigrasi.

A. Kewenangan Urusan Wajib

1. Pendidikan

a. Kondisi Umum

Dalam Urusan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanannya, antara lain melalui penambahan jumlah anggaran bidang pendidikan dari Tahun ke Tahun, sesuai amanat Pasal 31 Amandemen IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang cenderung stabil pada angka yang tinggi seperti tercantum pada Bab II, sedangkan Angka Partisipasi Kasar untuk Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan relatif masih rendah yaitu sebesar 56,52 (lima puluh enam koma lima puluh dua).

Salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah kondisi guru yang memiliki persyaratan kelayakan mengajar. Pada Tahun 2007/2008 jumlah guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 6.468 (enam ribu empat ratus enam puluh delapan) orang, dari jumlah tersebut sebanyak 4.628 (empat ribu enam ratus dua puluh delapan) orang dengan kualifikasi "*layak mengajar*" kemudian sebanyak 1.772 (seribu tujuh ratus tujuh puluh dua) orang dengan kualifikasi "*semi layak mengajar*" sedangkan jumlah guru dengan kualifikasi "*tidak layak mengajar*" sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang.

b. Permasalahan

Memperhatikan beberapa kondisi tersebut di atas, masih terdapat permasalahan yang perlu ditindaklanjuti pada Tahun 2009 antara lain :

- 1) rendahnya akses dan jangkauan pelayanan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

- 2) rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan terutama ruang kelas;
 - 3) rendahnya kualitas pendidikan luar sekolah; dan
 - 4) rendahnya kualitas tenaga kependidikan.
- c. Arah Kebijakan
- 1) meningkatkan akses pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 2) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 3) peningkatan kualitas pendidikan non formal (luar sekolah); dan
 - 4) peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Sasaran
- 1) tercukupinya akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 2) tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
 - 3) terwujudnya pendidikan non formal yang berkualitas; dan
 - 4) bertambahnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- e. Program
- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, bertujuan untuk peningkatan sarana prasarana dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dari Tingkat Desa sampai Kecamatan;
 - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun, bertujuan untuk peningkatan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk kelengkapan perpustakaan dan laboratorium serta peningkatan mutu pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu;
 - 3) Program Pendidikan Menengah, bertujuan untuk peningkatan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas termasuk kelengkapan perpustakaan dan laboratorium serta peningkatan mutu pendidikan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas termasuk pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi;

- 4) Program Pendidikan Non Formal, bertujuan untuk meningkatkan sarana prasana pendidikan non formal termasuk di dalamnya pengarusutamaan gender;
- 5) Program Pendidikan Luar Biasa, bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh;
- 6) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga pendidik melalui sertifikasi guru dan pembinaan kelompok kerja guru; dan
- 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, bertujuan untuk mendukung kebijakan pusat berkaitan dengan pelaksanaan Dana Alokasi Sekolah dan penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan.

2. Kesehatan

a. Kondisi Umum

Secara administrasi tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen cukup bervariasi. Beberapa kecamatan dikategorikan memiliki tingkat kesehatan tinggi dan sebagian lagi masuk kategori rendah. Kecamatan dengan tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut sudah baik. Sebaliknya kecamatan yang dikategorikan mempunyai tingkat kesehatan rendah menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat masih buruk sehingga perlu diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan pemerataan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan dan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya.

Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang makin baik tidak terlepas dari faktor pelayanan kesehatan, di samping faktor lingkungan, perilaku dan keturunan. Efektivitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana/prasarana kesehatan yang memadai, tersedianya tenaga kesehatan yang cukup dan profesional,

serta kemudahan penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Secara garis besar kondisi kesehatan masyarakat Kebumen menunjukkan peningkatan. Gambaran umumnya sebagai berikut :

- 1) angka kematian bayi per 1.000 (seribu) kelahiran di Kabupaten Kebumen menurun dari 6,65 (enam koma enam lima) pada Tahun 2004 menjadi 3,26 (tiga koma dua puluh enam) pada Tahun 2006;
- 2) angka harapan hidup meningkat dari 68,73 (enam puluh delapan koma tujuh puluh tiga) tahun pada Tahun 2004 menjadi 68,93 (enam puluh delapan koma sembilan puluh tiga) tahun pada Tahun 2006;
- 3) angka kesakitan Malaria menurun dari 0,44 (nol koma empat puluh empat) per 1.000 (seribu) penduduk menjadi 0,3 (nol koma tiga) per 1.000 (seribu) penduduk. Yang perlu mendapatkan perhatian saat ini adalah meningkatnya angka kesakitan Demam Berdarah *Dengue*, yang pada Tahun 2004 sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) per 10.000 (seribu) penduduk, menjadi 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) per 10.000 (seribu) penduduk. Tingginya angka kesakitan Demam Berdarah *Dengue* dikarenakan sifat endemik penyakit tersebut yang cenderung meluas, serta banyaknya penderita Demam Berdarah *Dengue* impor yang kemudian menjadi sumber penularan penyakit; dan
- 4) penderita gizi buruk pada skala kabupaten jumlahnya menurun cukup signifikan, dari 874 (delapan ratus tujuh puluh empat) orang pada Tahun 2004 menjadi 173 (seratus tujuh puluh tiga) orang pada Tahun 2006. Namun begitu, persentase penderita yang dirawat pun menurun, sehingga perlu untuk dapat ditingkatkan kembali.

Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat pada level kecamatan pada saat ini telah ada secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kebumen. Untuk kategori Puskesmas Non Perawatan terdapat 5 (lima) kecamatan yang memiliki 2 (dua) Puskesmas dan 1 (satu) kecamatan memiliki 3 (tiga) Puskesmas,

sedangkan untuk Puskesmas Perawatan terdapat 5 (lima) unit yang terletak di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Ambal, Prembun, Kutowinangun, Gombong dan Karanganyar. Sehingga total seluruhnya terdapat 35 (tiga puluh lima) Puskesmas untuk melayani seluruh penduduk Kebumen, atau 1 (satu) Puskesmas rata-rata melayani 34.920 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh) penduduk. Berdasarkan rasio ini sebetulnya masih diperlukan penambahan Puskesmas, karena idealnya 1 (satu) Puskesmas melayani 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk. Oleh karena itu, untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka didirikan Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh Kabupaten Kebumen secara merata dan proporsional berdasarkan luas wilayah dan kepadatan penduduk. Hingga Tahun 2006 telah terdapat peningkatan jumlah Puskesmas Pembantu, yaitu dari 72 (tujuh puluh dua) unit Tahun 2003 menjadi 75 (tujuh puluh lima) unit pada Tahun 2006. Dengan jumlah tersebut, maka 1 (satu) Puskesmas Pembantu rata-rata melayani 6 (enam) desa/kelurahan.

b. Permasalahan

- 1) rendahnya keterjangkauan kefarmasian dan obat asli Indonesia;
- 2) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta kepeduliannya terhadap lingkungan sehat;
- 3) rendahnya status gizi masyarakat;
- 4) rendahnya ketersediaan dan mutu tenaga kesehatan yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan;
- 5) rendahnya tingkat pelayanan dasar kesehatan dan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan;
- 6) belum sempurnanya kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dalam mendukung sistim kesehatan kabupaten menuju Indonesia Sehat 2010.

c. Arah Kebijakan

- 1) fasilitasi penyediaan pelayanan kefarmasian yang terjangkau dan pengembangan obat asli Indonesia yang berkualitas;

- 2) fasilitasi guna mendorong masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup bersih dan sehat serta pembentukan lingkungan sehat;
 - 3) peningkatan status gizi masyarakat guna mendukung perbaikan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia;
 - 4) fasilitasi terwujudnya ketersediaan tenaga kesehatan yang bermutu dan berdaya saing sesuai kebutuhan;
 - 5) fasilitasi guna mendorong peran aktif Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan sesuai SPM; dan
 - 6) pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung pemerintah pusat mewujudkan Indonesia Sehat 2010;
- d. Sasaran
- 1) meningkatnya ketersediaan obat esensial di berbagai institusi kesehatan daerah, baik swasta maupun pemerintah;
 - 2) meningkatnya proporsi keluarga yang hidup secara bersih dan sehat;
 - 3) menurunnya prevalensi kurang gizi pada balita;
 - 4) meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik dari Puskesmas, Rumah Sakit maupun tenaga kesehatan terlatih; dan
 - 5) menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian akibat penyakit.
- e. Program
- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui ketersediaan obat untuk Puskesmas dan RSUD;
 - 2) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada obat yang sifatnya kimia dengan mengembangkan obat tradisional yang ada di Kabupaten Kebumen;

- 3) Program Pengawasan Obat dan Makanan, bertujuan untuk mengawasi terhadap maraknya penjualan obat agar obat yang ada dimasyarakat sesuai dengan ketentuan;
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan melalui kelompok-kelompok yang lingkungan masing-masing;
- 5) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, bertujuan untuk menciptakan lingkungan sehat dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan kesehatan lingkungan;
- 6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan puskesmas dalam rangka mewujudkan Kebumen Sehat 2010;
- 7) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan perbaikan gizi masyarakat dengan fokus pada balita dan ibu hamil;
- 8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, bertujuan untuk mengurangi kejadian penyakit menular dan penanggulangan bagi daerah endemi;
- 9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar pelayanan cepat dan tepat;
- 10) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tersebar di wilayah perdesaan;
- 11) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana, bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
- 12) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengembangan pola kemitraan dan validasi Askeskin;

- 13) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan desa melalui pembinaan dan pelatihan tenaga medis di tingkat desa;
- 14) Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, bertujuan untuk memenuhi sarana prasarana termasuk di dalamnya alat kesehatan yang diperlukan dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen; dan
- 15) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, bertujuan untuk pemeliharaan baik rutin maupun berkala instansi dan alat-alat kesehatan rumah sakit.

3. Pekerjaan Umum

a. Kondisi Umum

1) Prasarana Jalan.

Jalan dan jembatan merupakan salah satu prasarana penting dalam melayani pergerakan orang dan barang serta prasarana perhubungan antar wilayah. Total panjang jalan Kabupaten Tahun 2007 adalah 621,83 (enam ratus dua puluh satu koma delapan puluh tiga) kilometer dan jumlah ruas jalan 156 (seratus lima puluh enam) ruas. Kondisi Jalan Kabupaten 57,16% (lima puluh tujuh koma enam belas persen) baik, 12,76% (dua belas koma tujuh puluh enam persen) sedang dan 18,5% (delapan belas koma lima persen) rusak dan 19,6% (sembilan belas koma enam persen) kondisinya rusak berat, di sisi lain terdapat ruas jalan non status yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintahan Kabupaten Kebumen.

Secara umum masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana kebinamargaan dalam mendukung kinerja penanganan jalan dan jembatan baik kualitas maupun kuantitasnya.

2) Sumber Daya Air.

Ketersediaan dan kualitas air bersih di berbagai tempat di Kabupaten Kebumen cenderung tidak menentu, baik karena

perubahan iklim maupun karena faktor-faktor lainnya. Pada musim kemarau, beberapa daerah masih mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan rumah tangga dan aktivitas sosial dan ekonomi. Sampai saat ini daerah yang masih mengalami kekurangan air bersih pada musim kemarau tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan.

Kondisi prasarana irigasi menunjukkan fungsi kinerja yang semakin baik. Dari data Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kebumen, pada Tahun 2007 area irigasi teknis di Kabupaten Kebumen seluas 28.502 (dua puluh delapan ribu lima ratus dua) Hektar, terdiri dari Daerah Irigasi Sistem Sempor 6.478 (enam ribu empat ratus tujuh puluh delapan) Hektar dan Daerah Irigasi Sistem Wadaslintang 21.402 (dua puluh satu ribu empat ratus dua) Hektar, serta Daerah Irigasi Non Waduk 622 (enam ratus dua puluh dua) Hektar. Panjang Saluran Induk dan Sekunder 375.422 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua) Kilometer, Bangunan Pengatur 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) buah, Bangunan Pelengkap 1.042 (seribu empat puluh dua) buah dan Pintu Air 829 (delapan ratus dua puluh sembilan) buah. Sejak Tahun 1978 mulai dioperasikan Waduk Sempor dan Tahun 1988 dioperasikan Waduk Wadaslintang. Sampai dengan Tahun 2007 belum pernah dilakukan rehabilitasi jaringan sehingga tingkat efisiensi jaringan irigasi sudah sangat menurun. Hal ini mengakibatkan banyak areal sawah tidak optimal. Secara keseluruhan daerah yang kesulitan mendapatkan air irigasi seluas 5.366 (lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) Hektar.

Kondisi sungai sebagian besar cukup baik, namun belum dapat menampung debit banjir dengan periode ulang tertentu. Kerusakan prasarana pengendali banjir dan penurunan kapasitas pengaliran, menyebabkan beberapa daerah menjadi rawan banjir. Prasarana penunjang pengelolaan pengairan yang mendukung

pengelolaan air di antaranya adalah jaringan stasiun hidroklimatologi dan fasilitas komunikasi yang menyediakan data sumber daya air. Sebagai sarana pengelolaan sumber daya air, maka fasilitas-fasilitas tersebut memerlukan pemeliharaan agar dapat memberikan pelayanan optimal.

b. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pembangunan Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2009, antara lain:

- 1) pada Tahun 2007 masih terdapat kesenjangan pertumbuhan wilayah, belum terselesaikannya akses jalan dari Kebumen menuju Banjarnegara;
- 2) pada Tahun 2007 terdapat jalan kabupaten dalam kondisi rusak dengan kategori sedang sebesar 17,05% (tujuh belas koma nol lima persen);
- 3) pada Tahun 2007 terdapat jalan kabupaten dalam kondisi rusak dengan kategori berat sebesar 19,83% (sembilan belas koma delapan puluh tiga persen);
- 4) adanya kerusakan jalan yang disebabkan oleh bencana alam banjir dan tanah longsor;
- 5) kurang memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan dalam mendukung kinerja penanganan jalan dan jembatan;
- 6) belum adanya data kondisi jalan dan jembatan yang *up to date* untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam perencanaan jalan dan jembatan;
- 7) terjadi penurunan nilai fungsi bangunan air dan saluran pembawa;
- 8) belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan air baku serta kurang terpeliharanya fungsi prasarana air baku; dan
- 9) terjadi kerusakan sarana dan prasarana pengendali banjir dan penurunan kapasitas pengaliran sehingga mengakibatkan banjir.

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan tersebut antara lain :

- 1) meningkatkan penanganan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi rusak dengan katagori sedang menjadi baik;
- 2) meningkatkan penanganan peningkatan jalan dan iembatan dalam kondisi rusak dengan katagori sedang menjadi kondisi baik;
- 3) mengantisipasi kemungkinan gangguan kerusakan jalan yang disebabkan oleh akibat bencana alam, banjir dan tanah longsor;
- 4) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kebinamargaan dalam mendukung kinerja penanganan jalan dan jembatan;
- 5) meningkatkan ketersediaan data kondisi jalan dan jembatan yang terbaru dalam menunjang perencanaan jalan dan jembatan;
- 7) meningkatkan nilai fungsi bangunan air dan saluran pembawa dalam mendukung ketahanan pangan; dan
- 8) meningkatkan fungsi layanan sarana prasarana sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air masyarakat.

d. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai antara lain :

- 1) terwujudnya pembangunan jalan tembus Kebumen-Banjarnegara di wilayah Kebumen utara;
- 2) terwujudnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi rusak dengan katagori sedang menjadi kondisi baik;
- 3) terwujudnya peningkatan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi rusak dengan katagori berat menjadi kondisi baik;
- 4) tertanganinya kerusakan jalan yang disebabkan oleh bencana alam, banjir dan tanah longsor;
- 5) terpenuhinya peningkatan kualitas dan kuantitas alat berat, sarana laboratorium, material jalan dan jembatan;

- 6) tersedianya leger jalan, data perhitungan lalu lintas, data jalan/jembatan yang terbaru;
- 7) terselenggaranya rehabilitasi, pemeliharaan dan operasi pada bangunan air dan saluran pembawa; dan
- 8) terpenuhinya kebutuhan air baku dan meningkatnya kualitas pengelolaan air baku.

e. Program

Untuk memecahkan permasalahan dan mencapai sasaran pembangunan urusan pekerjaan umum, program yang akan dilaksanakan antara lain :

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, bertujuan untuk perencanaan pembangunan jalan untuk kuota kecamatan yaitu tersediannya dokumen perencanaan teknis bidang kebinamargaan (untuk kuota kecamatan) dan pembangunan jalan untuk pemenuhan kuota kecamatan;
- 2) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, bertujuan untuk pembangunan saluran drainase/gorong-gorong untuk mengurangi genangan di musim penghujan dan melancarkan limbah cair rumah tangga/lingkungan, pembangunan saluran drainase jalan, serta rehabilitasi/pemeliharaan rutin saluran drainase/gorong-gorong dan trotoar;
- 3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, bertujuan untuk perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan untuk meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan bidang binamarga, pemeliharaan jalan kabupaten, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk kelancaran lalu lintas, ekonomi dan pemerintahan, rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 4) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, bertujuan untuk penanganan mendesak;
- 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, bertujuan untuk pengadaan alat berat (pembelian wales *baby*

roller), pengadaan alat pengukur laboratorium kebinamargaan, dan rehabilitasi/pemeliharaan alat berat;

- 6) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
- 7) Program Pengembangan Data/Informasi, bertujuan untuk penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan;
- 8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, bertujuan untuk menyusun program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Penataan Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun Kota Kebumen, penataan Ruang Terbuka Hijau Alun-Alun Kota Karanganyar, dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
- 9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, bertujuan untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga;
- 10) Program Pendidikan Kedinasan, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan profesionalisme;
- 11) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya, bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan jaringan irigasi, melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, memberdayakan petani pemakai air (mendukung upaya mewujudkan kemandirian di bidang ketahanan pangan melalui peningkatan fungsi layanan irigasi dan peran serta Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani), melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan sungai di Kabupaten Kebumen;
- 12) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air penyediaan air baku dan fungsi layanan sarana prasarana sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air masyarakat; dan

13) Program Pengendalian Banjir, bertujuan untuk melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai untuk mengurangi kerugian yang mungkin timbul akibat banjir terutama pada kawasan strategis dan sentra produksi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir, melaksanakan normalisasi/pembangunan jaringan drainase, melaksanakan pembangunan/rehabilitasi bendung drainase, melaksanakan pembangunan infrastruktur pengairan bencana alam serta menyediakan penunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Kabupaten Kebumen.

4. Perumahan Rakyat

a. Kondisi Umum

Pembangunan perumahan merupakan tanggung jawab dan sinergitas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan maka pemerintah mengutamakan penyediaan perumahan bagi masyarakat kurang mampu/Rumah Tangga Miskin dan mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan perumahan.

Bencana alam yang banyak terjadi sepanjang Tahun 2007 yang mengakibatkan kerusakan perumahan dan permukiman, terutama disebabkan oleh tanah longsor, banjir, tsunami, kebakaran.

b. Permasalahan

Permasalahan yang masih dihadapi pembangunan urusan perumahan rakyat pada Tahun 2009 antara lain :

- 1) rendahnya kemampuan dan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak;
- 2) rendahnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman; dan
- 3) rendahnya peran serta masyarakat dan kinerja komunitas perumahan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan kuantitas perumahan.

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan tersebut antara lain :

- 1) meningkatkan fasilitasi dan sinergitas sumber daya pembangunan perumahan, baik dari pemerintah, masyarakat serta dunia usaha, untuk meningkatkan penyediaan dan akses masyarakat terhadap perumahan terutama untuk Rumah Tangga Miskin; dan
- 2) meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman melalui sinergitas peran *stakeholder* dalam proses pembangunan dan pengelolaannya.

d. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai antara lain :

- 1) tersedianya penyediaan perumahan dan dana stimulan untuk pembangunan perumahan swadaya bagi Rumah Tangga Miskin; dan
- 2) terwujudnya kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan pemukiman perumahan Pegawai Negeri Sipil, desa nelayan, desa tradisional, permukiman kumuh, desa pusat pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa; dan
- 3) penataan lingkungan perumahan di desa perbaikan kualitas perumahan Rumah Tangga Miskin dan prasarana lingkungan akibat bencana alam melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat.

e. Program

Untuk memecahkan permasalahan dan mencapai sasaran pembangunan urusan perumahan rakyat, maka program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Perumahan yang bertujuan memfasilitasi dan memberikan stimulan pembangunan perumahan masyarakat untuk meningkatkan penyediaan perumahan terutama bagi Rumah Tangga Miskin sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) kepala keluarga.

5. Penataan Ruang

a. Kondisi Umum

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen yang ditetapkan dengan Perda Nomor 9 Tahun 1998 merupakan pedoman dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang di Kabupaten Kebumen dalam upaya menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi lindung dan budidaya menuju pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen merupakan prioritas. Hal tersebut sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang semakin memantapkan dokumen Rencana Tata Ruang sebagai pedoman pembangunan daerah.

Pada Tahun 2007, pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten telah dilakukan dengan kegiatan-kegiatan, antara lain :

- 1) penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, di mana saat ini masih proses menjadi Perda dan disusun pada saat bersamaan dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru atau transisi; dan
- 2) belum tersusunnya rencana operasional penjabaran rencana pengembangan kawasan strategis dan kawasan prioritas dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai penjabaran dari peraturan perundangan yang baru tersebut, yang perlu segera dijabarkan ke dalam rencana yang lebih rinci untuk arah pemanfaatan dan dan pengendalian ruang, sehingga memudahkan daerah dalam penyusunan tata ruang.

Sampai akhir Tahun 2007 telah tersusun 2 (dua) dokumen perencanaan tata ruang penjabaran perencanaan tata ruang atau penjabaran operasional Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu di tingkat Nasional telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, hal ini akan mempengaruhi dokumen penataan ruang yang ada di daerah sehingga sesuai ketentuan yang berlaku wajib disesuaikan.

Saat ini telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kebumen yang berfungsi melaksanakan perencanaan dan pengendalian penataan ruang dan peningkatan pemahaman tentang rencana tata ruang, namun belum optimal.

Peran serta masyarakat dan aparaturnya pemerintah dalam penataan ruang baik pada aspek perencanaan, pemanfaatan, ruang dan pengendalian ruang masih belum merata dan optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terutama pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana alam, banyaknya alih fungsi lahan dari kawasan lindung ke fungsi budidaya dan sawah ke non sawah.

Pembangunan perwilayahan merupakan upaya untuk meningkatkan keterpaduan, keserasian dan keseimbangan pembangunan antar wilayah/kawasan berdasarkan potensi, unggulan dan permasalahan wilayah/kecamatan. Kondisi dari pembangunan wilayah/kecamatan/kawasan unggulan, beberapa masih belum optimal memerlukan peningkatan terutama pada ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kawasannya dan keterpaduan pengelolaan pembangunannya, sehingga masih perlu disinkronkan antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas, hal ini disebabkan jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun namun waktu penentuan awal perencanaannya berbeda.

b. Permasalahan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan urusan penataan ruang pada Tahun 2009, antara lain :

- 1) belum seluruh kawasan strategis memiliki dokumen Rencana Tata Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kabupaten, sektoral dan masyarakat serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen dan Rencana Tata Ruang lainnya sudah tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 2) belum optimalnya kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten; dan
- 3) kurangnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat umum dan aparatur pemerintah dalam penataan ruang terutama pada kawasan lindung dan rawan bencana alam.

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) meningkatnya ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat dan keterpaduan pembangunan kabupaten;
- 2) meningkatkan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsinya; dan
- 3) meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat umum dan aparatur pemerintah dalam penataan ruang terutama pada kawasan lindung dan rawan bencana alam.

d. Sasaran

Sasaran pembangunan penataan ruang, pada Tahun 2009 adalah:

- 1) tersusunnya evaluasi, revisi dan pemantapan materi pengganti Peraturan Daerah tentang penataan ruang dan tersusunnya Rencana Tata Ruang lainnya; dan

- 2) terwujudnya peningkatan kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten dan terpantaunya serta terkendalinya pemanfaatan ruang.

e. Program

Untuk memecahkan permasalahan dan mencapai sasaran pembangunan urusan penataan ruang, program yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang bertujuan untuk menyusun pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta koordinasi antar instansi dalam penataan ruang berjalan dengan baik

6. Perencanaan Pembangunan

a. Kondisi Umum

Mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Kebumen, dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional di mana untuk mendukung perencanaan pada setiap level pelaksanaan diperlukan data yang akurat, baik itu kegiatan dalam lingkup daerahnya itu sendiri, kegiatan maupun dalam lingkup regional (antar kecamatan dan antar kabupaten).

Di sisi lain, dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengendalian pembangunan dan untuk melaksanakan kegiatan di Tahun 2009 diperlukan pendukung baik dari aspek mekanisme perencanaan, pelaporan dan pengendalian serta penunjang lainnya.

b. Permasalahan

- 1) terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan;

- 2) belum optimalnya program kerjasama antar daerah;
 - 3) belum optimalnya perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah; dan
 - 4) kurang optimalnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
- c. Arah Kebijakan
- 1) pengembangan data dan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan;
 - 2) pengoptimalan program-program kerjasama sesuai dengan kebutuhan;
 - 3) peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan;
 - 4) peningkatan perencanaan dan pengendalian program pembangunan daerah;
 - 5) peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi;
 - 6) peningkatan perencanaan pembangunan sosial dan budaya; dan
 - 7) peningkatan perencanaan pembangunan prasarana perwilayahan dan sumber daya alam.
- d. Sasaran
- 1) terwujudnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan;
 - 2) terwujudnya peningkatan program-program kerjasama dalam bidang pembangunan;
 - 3) terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan sumber daya manusia aparatur perencanaan pembangunan;
 - 4) terwujudnya perencanaan dan pengendalian program pembangunan;
 - 5) terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan ekonomi;
 - 6) terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan sosial budaya; dan
 - 7) terwujudnya peningkatan perencanaan pembangunan prasarana perwilayahan dan sumber daya alam.

e. Program

- 1) Program Pengembangan Data/Informasi, bertujuan untuk menyusun data yang diperlukan dalam kebijakan penyusunan anggaran dan pengendalian kegiatan;
- 2) Program Kerjasama Pembangunan Antar Daerah, bertujuan untuk meningkatkan sinergitas pembangunan dalam lingkup regional;
- 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, bertujuan untuk menyusun perencanaan untuk kawasan strategis dan koordinasi antar instansi dalam penataan ruang;
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis aparat perencanaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 5) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, bertujuan untuk mendukung terlaksananya perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, bertujuan untuk menyusun riset daerah dan mendukung pelaksanaan musrenbang mulai dari tingkat kecamatan sampai nasional serta terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- 7) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, bertujuan untuk mendukung suksesnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri;
- 8) Program Perencanaan Sosial Budaya, bertujuan untuk mendukung program nasional tentang pengelolaan air bersih dan menyusun dokumen perencanaan sebagai pendukung untuk pengembangan pada Tahun berikutnya; serta
- 9) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, bertujuan untuk menginventarisasi data berkaitan dengan Daerah Pengaliran Sungai dan sebagai tindak lanjut pemantauan pasca *South Java Flood Control Sector Project*.

7. Perhubungan

a. Kondisi Umum

Wilayah Kabupaten Kebumen sangat strategis dalam mendukung sistem transportasi Provinsi Jawa Tengah dan menjembatani pergerakan orang/barang. Apalagi setelah dibukanya jalan Gombang-Banjarnegara, jalan Prembun-Wonosobo dan pada Tahun ini jalan tembus Kebumen-Wonosobo. Beban aktivitas transportasi di Kabupaten Kebumen semakin menjadi lebih berat karena merupakan jalur antara/transit antar Kabupaten. Hal ini berdampak pada manajemen transportasi terkait kemampuan infrastruktur, daya dukung prasarana transportasi dalam memperhatikan tingkat kelancaran, keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna transportasi. Sistem transportasi darat Kabupaten Kebumen dilalui beberapa ruas jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten, termasuk jalan poros desa. Saat ini sedang dibangun ruas jalan nasional yaitu Jalur Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh dan memperlancar serta menyeimbangkan kegiatan perekonomian antara Pantai Selatan dan Pantai Utara.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari resiko kecelakaan, pada Tahun 2007 telah dilakukan kegiatan pemeliharaan dan pengadaan *Traffic Light* dan *Warming Lamp*, pemeliharaan dan pengecatan marka jalan, pengadaan rambu lalu lintas 65x65 Centimeter, pengadaan Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan, posko angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, serta kegiatan pengadaan dan pemeliharaan *Traffic Light*.

b. Permasalahan

Permasalahan pembangunan dalam urusan perhubungan yang dihadapi, antara lain :

- 1) kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta rendahnya kualitas pelayanan jasa bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- 2) rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas;
- 3) tingginya angka kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- 4) belum optimalnya perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) masih lemahnya manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka keselamatan lalu lintas; dan
- 6) masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan dalam urusan perhubungan adalah meningkatkan sarana prasarana lalu lintas, kualitas pelayanan jasa bidang angkutan jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas.

d. Sasaran

Sasaran pembangunan urusan pehubungan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009, adalah sebagai berikut :

- 1). terwujudnya peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kelaikan jalan kendaraan bermotor, kualitas pelayanan jasa bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kualitas pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatnya disiplin berlalu lintas masyarakat, manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2). terwujudnya peningkatan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatnya kelaikan jalan kendaraan bermotor, meningkatnya kualitas pelayanan jasa bidang lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas dan angkutan jalan, serta meningkatnya disiplin berlalu lintas masyarakat. Meningkatnya manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meningkatnya

profesionalisme Sumber Daya Manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- 3). terlaksananya kegiatan penelitian dan pengembangan urusan perhubungan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

e. Program

- 1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, bertujuan untuk meningkatkan kewibawaan aparaturnya dengan pengadaan pakaian dinas dan petugas parkir;
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Lalu Lintas Angkutan Jalan, bertujuan untuk memperbaiki sarana prasarana jalan, landasan parkir bus/kendaraan Terminal Bus Kebumen dan Prembun, pengecatan ruang tunggu Terminal Bus Gombong dan Prembun, penyusunan *Detail Engineering Design* Terminal Karangsembung dan pemeliharaan *traffic light* dan *warming lamp* di Kabupaten Kebumen;
- 3) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, bertujuan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas melalui pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan, koordinasi lintas sektoral penanganan masalah lalu lintas dan pengadaan *traffic light*, *warming lamp* dan papan nama jalan dan operasi kelaikan jalan; dan
- 4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, bertujuan untuk mendukung petugas dalam pengujian pengadaan alat pengujian kendaraan *sound level*.

8. Lingkungan Hidup

a. Kondisi Umum

Kejadian bencana di Kabupaten Kebumen merupakan dampak adanya pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang semestinya berfungsi lindung namun karena desakan kebutuhan lahan dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya. Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam hutan lindung dan hutan produksi untuk tujuan strategis dan untuk kepentingan umum terbatas dengan persyaratan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Kawasan hutan di Kabupaten Kebumen saat ini adalah seluas 16.861 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh satu) Hektar atau 12,16% (dua belas koma enam belas persen) dari luas wilayah Kabupaten Kebumen, terdiri dari hutan rakyat seluas 9.136 (sembilan ribu seratus tiga puluh enam) Hektar dan hutan negara seluas 16.903,2 (enam belas ribu sembilan ratus tiga koma dua) Hektar. Hutan negara yang dimaksud terdiri dari hutan produksi seluas 16.903,2 (enam belas ribu sembilan ratus tiga koma dua) Hektar.

Perluasan hutan dengan mengelola kawasan dengan fisiografi seperti hutan lindung di luar kawasan hutan, yang diperkirakan mencapai 23.410,11 (dua puluh tiga ribu empat ratus sepuluh koma sebelas) Hektar tersebar di wilayah kecamatan. Pengelolaan kawasan tersebut dapat dilakukan secara bersama sesuai nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Tengah dengan Bupati Kebumen.

Mendasari Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional Nomor: 18/Kep/Menko/Kesra/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dari Data Dinas Perhutanan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten Kebumen Tahun 2007, kerusakan hutan dan lahan serta proporsi luas lahan kritis pada Tahun 2004 masih cukup tinggi mencapai 58.923,04 (lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tiga koma nol empat) Hektar. Sampai Tahun 2007 luas lahan kritis di Kabupaten Kebumen berkurang hingga mencapai 11.151 (sebelas ribu seratus

lima puluh satu) Hektar, dengan tingkat penutupan lahan vegetasi seluas 9.356 (sembilan ribu tiga ratus lima puluh enam) Hektar.

Penurunan kualitas atau tingkat penutupan lahan dari vegetasi seperti pada lahan kritis ini mempengaruhi kemampuan perubahan kualitas udara, khususnya perubahan Karbondioksida menjadi Oksigen baku mutu udara ambien.

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan dapat dilihat pula dari meningkatnya volume sampah domestik. Total volume sampah domestik rata-rata orang per hari Tahun 2007 mencapai 3,008 (tiga koma nol nol delapan) liter per orang per hari, atau dengan volume 3.676,81 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh satu) meter kubik per hari.

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen tidak lepas dari pemahaman dan kesadaran dari seluruh *stakeholder* dan masyarakat. Pemahaman masyarakat terhadap resiko dampak kerusakan lingkungan dalam jangka panjang masih terbatas dan sering diabaikan apabila dikaitkan dengan upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Total volume sampah domestik rata-rata perhari Tahun 2007 mencapai 1.323.651 (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu) meter kubik per tahun. Pada satu sisi limbah industri (besar dan kecil menengah), serta penggunaan pupuk dan pestisida dalam budidaya pertanian, juga berpotensi menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara. Dari hasil pengujian kualitas air pada titik pantau di beberapa wilayah perairan menunjukkan adanya kandungan limbah cair COD pada musim penghujan rata-rata sebesar 16,7 (enam belas koma tujuh) miligram per liter, di atas baku mutu sebesar 10 (sepuluh) miligram per liter yang dianjurkan Pemerintah.

Polusi udara meningkat seiring meningkatnya sumber pencemaran dari moda transportasi, pencemaran udara tersebut berupa debu pada musim penghujan rata-rata sebesar 411,14 (empat ratus sebelas koma empat belas) mikrogram per meter kubik di atas baku

mutu udara ambien yang dianjurkan sebesar 230 (dua ratus tiga puluh) mikrogram per meter kubik.

Untuk menanggulangi pencemaran industri, telah dilakukan monitoring dan evaluasi kualitas limbah pada perusahaan yang ada di Kabupaten Kebumen serta dilakukan pemantauan kualitas air secara rutin di Sungai Luk Ulo, Sungai Kreteg, Sungai Jatinegara, Sungai Kedung Bener, Sungai Gentan, Sungai Karanganyar dan Waduk Sempor setiap 6 (enam) bulan sekali. Di samping itu juga dilakukan fasilitasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah. Program Kali Bersih yang merupakan bagian dari Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup meliputi kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan kali bersih, turut pula menyertai hasil pembangunan lingkungan hidup. Sejak Tahun 2006 Kabupaten Kebumen telah dikembangkan sistem penyediaan Basis Data Lingkungan Hidup melalui penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, yang mencakup kondisi sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia.

b. Permasalahan

- 1). banyaknya pemanfaatan kawasan lindung, seperti Ruang Terbuka Hijau dan sempadan mata air/sungai/pantai/waduk yang tidak sesuai. Tingginya luasan kerusakan hutan dan lahan, menurunnya daya tampung sungai dan waduk sebagai akibat peningkatan laju erosi dan sedimentasi tanah;
- 2). rendahnya efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pemulihan kerusakan dan daya tampung/dukung lingkungan pada lingkungan perkotaan, lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya;
- 3). rendahnya keberdayaan dan peran serta masyarakat, aparat/petugas dan *stakeholder* lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- 4). adanya potensi pencemaran udara pada kawasan perkotaan akibat meningkatnya gas buang dari aktivitas industri dan kendaraan

bermotor, serta menurunnya kualitas lingkungan perairan (sungai, waduk, rawa, estuaria dan pantai) dan lahan sebagai akibat peningkatan pencemaran yang bersumber dari kegiatan industri, rumah tangga, hotel, rumah sakit dan pertanian;

- 5). belum lengkapnya perangkat hukum dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum lingkungan serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang lingkungan; dan
- 6). terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

c. Arah Kebijakan

- 1). mengembangkan keserasian aktivitas pembangunan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta peningkatan upaya rehabilitasi/pemulihan konservasi fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak melalui pelibatan peran serta masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 2). meningkatkan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pemulihan kerusakan dan daya tampung/dukung lingkungan pada lingkungan perkotaan, lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya;
- 3). meningkatkan keberdayaan dan peran serta masyarakat, aparat/petugas dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan lingkungan;
- 4). meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan melalui penerapan manajemen produksi limbah, teknologi ramah lingkungan dan pengolahan limbah;
- 5). menyusun produk hukum daerah tentang lingkungan, meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat tentang hukum lingkungan; dan
- 6). mengembangkan basis data dan informasi tentang sumber daya alam, dan lingkungan yang memadai serta mudah diakses.

d. Sasaran

- 1). terwujudnya pemulihan kerusakan lingkungan dan konservasi lahan pada kawasan hutan seperti Ruang Terbuka Hijau dan sempadan mata air/sungai/pantai/waduk. Berkurangnya kerusakan hutan dan lahan serta meningkatnya daya tampung sungai dan waduk;
- 2). terlaksananya pengendalian dan pengawasan pemulihan kerusakan dan daya tampung/dukung lingkungan pada lingkungan perkotaan, lingkungan perumahan dan lahan-lahan budidaya;
- 3). terwujudnya peningkatan keberdayaan dan peran serta masyarakat, aparat/petugas dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
- 4). tercapainya tingkat pencemaran udara yang semakin berkurang pada kawasan perkotaan dan terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perairan (sungai, waduk, rawa, estuaria dan pantai) dan lahan;
- 5). tersusunnya produk hukum daerah sebagai aturan pelaksanaan melengkapi peraturan perundangan lingkungan hidup yang telah ada dan meningkatnya pemahaman serta ketaatan masyarakat terhadap peraturan di bidang lingkungan; dan
- 6). tersedianya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai dan mudah diakses.

e. Program

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan, bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, sehingga terbentuk kampung ramah lingkungan dalam pengelolaan persampahan dan meningkatkan kesehatan lingkungan;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup, bertujuan :

- a) melaksanakan koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura guna mewujudkan Kota Kebumen yang bersih dan sehat menuju Program Adipura;
 - b) melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan untuk memantau kualitas lingkungan udara ambien dan air badan air dan kegiatan usaha wajib Amdal;
 - c) melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup untuk pengawasan kegiatan usaha potensi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penilaian dokumen Amdal oleh Komisi Amdal dan pengarahannya dokumen;
 - d) pengembangan Produksi Ramah lingkungan untuk pengembangan pelaku usaha dan masyarakat;
 - e) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dan membentuk kader lingkungan hidup;
 - f) monitoring evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - g) pengadaan sarana dan prasarana pemantauan air untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya, bertujuan:
- a) melaksanakan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air untuk melestarikan sumber mata air melalui Pengolahan Air Hujan;
 - b) pengendalian dampak perubahan iklim untuk mensosialisasikan dan pengendalian iklim mikro serta menginventarisasi kegiatan usaha yang menggunakan bahan perusak;
 - c) melaksanakan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air untuk melindungi catchment area waduk Sempor dan mata air di Kecamatan Karangsembung dan Sempor;
 - d) pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem untuk menginventarisasi keanekaragaman hayati dan penyusunan

profil keanekaragaman hayati dan pelestarian keanekaragaman hayati 2010;

- 4) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam untuk mewujudkan dan menyempurnakan terasering, pembuatan *Gully Plug*, Dam Penahan serta pembuatan sumur resapan;
- 5) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi, bertujuan meningkatkan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup untuk mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan hidup melalui *clean and green school* serta menyediakan pengembangan informasi lingkungan hidup dan menyusun laporan status lingkungan hidup sebagai sumber data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kebumen;
- 6) Program peningkatan Pengendalian Polusi, bertujuan membangun tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi; dan
- 7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan, norma, standar prosedur dan manual pengelolaan ruang terbuka hijau, menyusun program pengembangan ruang terbuka hijau dengan mewujudkan bangunan hutan kota Kebumen.

9. Pertanahan

a. Kondisi Umum

Kegiatan inventarisasi dan evaluasi perubahan penggunaan tanah sawah irigasi dan produktif di Kabupaten Kebumen telah selesai seluruhnya pada Tahun 2007 dan telah diserahkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetapi belum dapat implementatif langsung dilaksanakan karena belum disepakati dan berketetapan hukum dengan Peraturan Daerah Sawah Lestari di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

b. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan dalam pembangunan urusan pertanahan yang diperkirakan masih dihadapi pada Tahun 2009 antara lain :

- 1) belum terturnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga menimbulkan tingginya alih fungsi lahan terutama pada kawasan lindung dan tanah sawah produktif; dan
- 2) belum optimalnya pelayanan administrasi pertanahan dengan banyaknya bidang tanah yang belum tertib penguasaan.

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan urusan pertanahan untuk memecahkan permasalahan tersebut, antara lain :

- 1) meningkatkan pengendalian dan pengaturan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui penerapan Manajemen Pertanahan Berbasis Desa mendasarkan fungsi pada Rencana Tata Ruang Wilayah terutama pada kawasan lindung dan tanah sawah lestari dengan memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan/insentif bagi masyarakat; dan
- 2) meningkatkan penertiban pendaftaran dan pemberian hak atas tanah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

d. Sasaran

Sasaran pembangunan urusan pertanahan pada Tahun 2009 untuk memecahkan permasalahan tersebut, antara lain :

- 1) tersosialisasi dan terlaksananya Manajemen Pertanahan Berbasis Desa pada sawah lestari dan kawasan lindung; dan
- 2) Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi pertanahan terutama dalam inventarisasi Aset Kabupaten Kebumen.

e. Program

Program pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009 adalah Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah yang bertujuan untuk mengurangi pelanggaran penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta melakukan penataan dan pengendalian tentang penguasaan, pemilikan maupun pemanfaatan tanah, dan penyuluhan hukum pertanahan.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Kondisi Umum

Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen berkaitan dengan pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 50 Tahun 2004, di mana kecamatan diberikan kewenangan untuk mengelola Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Untuk membuat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga masyarakat hanya dikenakan biaya administrasi dan pengantar dari desa/kelurahan.

Secara umum, kebijakan tersebut apabila dilihat dari aspek waktu pelayanan lebih cepat, dan dari aspek pembiayaan lebih hemat. Di sisi lain, untuk pelayanan Akta Kelahiran, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah bekerjasama dengan Kantor Pos Kebumen, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang terpelosok dengan cepat dan mudah.

b. Permasalahan

Untuk meningkatkan pelayanan urusan kependudukan, dijumpai ada beberapa permasalahan, antara lain :

- 1) belum optimalnya penataan administrasi kependudukan baik di tingkat desa, kecamatan sampai ke kabupaten, sehingga apabila dibutuhkan data kependudukan dibutuhkan waktu yang lama untuk validasi data; dan
- 2) masih kurangnya sarana prasarana penunjang kependudukan berupa blangko kependudukan.

c. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dengan membentuk tim yang melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berhubungan dengan urusan kependudukan; dan
- 2) pengadaan sarana prasarana kependudukan.

d. Sasaran

Sasaran pembangunan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2009, sebagai berikut:

- 1) tertibnya administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kabupaten; dan
- 2) terpenuhinya sarana prasarana penunjang untuk urusan kependudukan.

e. Program

Program Urusan Kependudukan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009, sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, bertujuan untuk menata administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten; dan
- 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan menekan biaya yang dibebankan kepada masyarakat.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Kondisi Umum

Prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak terlepas dari visi dan misi Bupati Kebumen yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2006-2010, di mana salah satunya adalah pengembangan sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan

derajat kesehatan individu dan masyarakat, pendidikan, keterampilan serta profesionalisme. Salah satu yang perlu dipahami untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan pemahaman konsep gender. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari keadaan sosial dan budaya masyarakat, di mana peran tersebut dapat berubah karena perubahan keadaan sosial dan budaya masyarakat juga.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah belum dipahaminya konsep gender sehingga menimbulkan adanya diskriminasi terhadap perempuan, antara lain kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Dari Tabel 4.1 berikut ini dapat dilihat bahwa jumlah korban kekerasan di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga berani melaporkan adanya kasus tersebut kepada aparat yang berwenang.

Tabel 4.1. Korban Kekerasan di Kabupaten Kebumen Tahun 2002-2007

TAHUN	JENIS KEKERASAN				JUMLAH
	FISIK DAN PENGANIAYAAN	PENCABULAN DAN PEMERKOSAAN	PENELANTARAN EKONOMI	PSIKIS	
2002	3	-	-	-	3
2003	7	-	-	-	7
2004	7	-	-	-	7
2005	22	-	-	-	22
2006	41	25	1	-	67
2007	62	22	-	-	86

Sumber : Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen

Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya perempuan adalah dengan peningkatan derajat kesehatan perempuan, terlihat dari data mengenai angka kematian ibu melahirkan dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 sebagaimana tabel 4.2, menunjukkan tren yang menurun, didukung dengan meningkatnya kesadaran ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya di sarana pelayanan kesehatan yang ada. Selain itu, juga dipengaruhi oleh faktor jumlah cakupan persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Sedangkan tabel 4.3 menyajikan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen di mana trennya semakin meningkat.

Tabel 4.2. Angka Kematian Ibu karena Persalinan di Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2007

NO.	TAHUN	ANGKA KEMATIAN IBU KARENA PERSALINAN
1.	2005	59,71/100.000
2.	2006	55,00/100.000
3.	2007	51,26/100.000

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen

Tabel 4.3. Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2007

NO.	TAHUN	PERSALINAN OLEH NAKES
1.	2005	60,20 %
2.	2006	72,84 %
3.	2007	80,25 %

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Kebumen

b. Permasalahan

Dari uraian di atas dapat dijelaskan meskipun jumlah korban kekerasan tidak tinggi, tetapi sebenarnya fenomena ini seperti gunung es, artinya jumlah yang diketahui/dilaporkan sedikit, tetapi yang terjadi sebenarnya banyak. Selain itu, meskipun angka kematian ibu melahirkan semakin menurun dan jumlah cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan semakin baik, upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap ibu hamil harus tetap dilakukan. Secara lengkap isu strategis dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut :

- 1) masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender;
- 2) belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dikarenakan antara lain belum optimalnya sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- 3) Masih rendahnya peran perempuan dalam berbagai aktivitas pembangunan, serta dalam proses politik dan jabatan publik dan masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, deskriminatif terhadap perempuan dan tidak peduli anak.

c. Kebijakan

Untuk menjawab isu strategis yang ada maka kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

e. Prioritas Pembangunan Tahun 2009

- 1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender;
- 2) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, bertujuan untuk melatih Sumber Daya Manusia pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- 3) Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, bertujuan untuk melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Perempuan dan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan peran serta dan kesetaraan gender.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Kondisi Umum

Urusan Keluarga Berencana di Kabupaten Kebumen dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera juga perlu mendapatkan perhatian. Dari tabel 4.4, dapat dilihat bahwa jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Kebumen dari Tahun 2005 sampai dengan 2007 menunjukkan angka yang relatif tetap, sedangkan jumlah pasangan usia subur hamil mengalami tren yang meningkat dan persentase peserta Keluarga Berencana terhadap pasangan usia subur berfluktuatif di kisaran 70% (tujuh puluh persen). Dari data persentase peserta Keluarga Berencana ini, berarti masih sekitar 30% (tiga puluh persen) pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor Keluarga Berencana.

Tabel 4.4. Jumlah Pasangan Usia Subur, Pasangan Usia Subur Hamil dan Persentase Peserta Keluarga Berencana terhadap Pasangan Usia Subur Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2007

	TAHUN 2005	TAHUN 2006	TAHUN 2007
PUS	205.946	205.656	206.484
PUS Hamil	6.087	6.506	6.447
Persentase Peserta KB	73,23	71,59	74,16

Sumber : Kebumen Dalam Angka Tahun 2007

Dalam penggunaan alat kontrasepsi, paling banyak digunakan adalah suntik sebanyak 66.876 (enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam) akseptor pada Tahun 2005 dan 73.707 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh) akseptor pada Tahun 2007. Berikutnya adalah pil sebanyak 32.875 (tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima) akseptor pada Tahun 2005 dan 32.914 (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat belas) akseptor pada Tahun 2007, diikuti *Intra Uterine Device*, implant, Metode Operasi Wanita, Metode Operasi Pria dan kondom. Alat kontrasepsi pil dan suntik masih sangat diminati karena paling murah dan mudah, sedangkan *Intra Uterine Device* dan implant dirasa mahal.

b. Permasalahan

Dari data kondisi umum di atas, bahwa kenaikan jumlah Pasangan Usia Subur hamil dikaitkan dengan diberlakukannya Keluarga Berencana mandiri, di mana bagi penduduk miskin biaya untuk menjadi peserta Keluarga Berencana masih cukup mahal. Isu strategis dalam pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah belum optimalnya pelayanan Keluarga Berencana kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin.

c. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana bagi masyarakat serta meningkatkan jejaring kerja Keluarga Berencana melalui pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

d. Sasaran

Sasaran pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas dengan fokus peningkatan pelayanan Keluarga Berencana bagi penduduk yang kurang mampu.

e. Program

- 1) Program Keluarga Berencana, bertujuan untuk menyediakan pelayanan Keluarga Berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi, pembinaan Keluarga Berencana, pelayanan kontrasepsi, pembinaan petugas Keluarga Berencana, dan pengadaan sarana prasarana pelayanan Keluarga Berencana;
- 2) Program Pelayanan Kontrasepsi, bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan Keluarga Berencana Kes Manunggal (Polri, TNI dan PKK) dan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi Metode Operasi Wanita dan Metode Operasi Pria;
- 3) Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana/Keluarga Remaja yang Mandiri, bertujuan

untuk melaksanakan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli Keluarga Berencana dengan revitalisasi/penguatan Posyandu di 2096 (dua ribu sembilan puluh enam) Sub Petugas Penyuluh Keluarga Berencana Desa;

- 4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja, bertujuan untuk pendirian pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja serta fasilitas forum pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah; dan
- 5) Program Pembinaan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, bertujuan untuk Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga.

13. Sosial

a. Kondisi Umum

Pembangunan urusan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya dampak negatif dari persoalan kesenjangan sosial, disintegrasi sosial dan penyakit sosial, yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan, kerawanan sosial ekonomi, lemahnya ketahanan sosial dan potensi konflik sosial budaya dalam masyarakat.

Berkait dengan urusan sosial, sampai dengan Tahun 2006, di Kabupaten Kebumen terdapat 5.486 (lima ribu empat ratus delapan puluh enam) orang penyandang cacat dari berbagai jenis kecacatan, sedangkan prasarana sosial yang ada di Kabupaten Kebumen masih sangat terbatas di mana di Kabupaten Kebumen terdapat 1 (satu) panti karya dengan penghuni 50 (lima puluh) orang dan panti asuhan sebanyak 10 (sepuluh) panti dengan jumlah penghuni sebanyak 223 (dua ratus dua puluh tiga) orang. Untuk panti karya jumlahnya tetap sedangkan untuk panti asuhan jumlahnya terus menurun, demikian juga penghuninya. Pada Tahun 2004 jumlah panti asuhan ada 12 (dua

belas) panti dan Tahun 2005 ada 11 (sebelas) panti asuhan dengan penghuni masing-masing 318 (tiga ratus delapan belas) orang dan 314 (tiga ratus empat belas) orang.

b. Permasalahan

Beberapa isu strategis dalam pembangunan urusan sosial adalah:

- 1) belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang disebabkan banyaknya penduduk miskin, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran dan bencana alam;
- 2) belum memadainya sarana dan prasarana panti sosial baik milik pemerintah maupun swasta;
- 3) belum optimalnya upaya pembinaan dan pelestarian sikap kerelawanan, nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan;
- 4) belum optimalnya fasilitasi lembaga-lembaga sosial dan organisasi sosial masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- 5) belum efektifnya penanganan bencana alam baik yang bersifat deteksi dini (preventif), represif/tanggap darurat maupun rehabilitasi korban bencana alam.

c. Kebijakan

Arah kebijakan yang digunakan dalam pembangunan urusan sosial adalah:

- 1) meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 2) meningkatkan sarana dan prasarana panti sosial sehingga mampu melindungi dan mengembalikan fungsi sosial masyarakat penyandang cacat;
- 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendayagunakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial dan penanaman sikap kerelawanan;
- 4) meningkatkan keberdayaan lembaga-lembaga sosial dan organisasi sosial dalam peningkatan kesejahteraan; dan
- 5) meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi bencana alam secara cepat dan tepat.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

- 1) terwujudnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara optimal;
- 2) terwujudnya peningkatan peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanaman sikap kerelawanan, nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan di masyarakat;
- 3) terwujudnya keberdayaan lembaga-lembaga sosial dan organisasi sosial dalam peningkatan kesejahteraan;
- 4) terwujudnya kesiapsiagaan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi bencana alam serta memulihkan fungsi sosial bagi korban bencana.

e. Prioritas Pembangunan Tahun 2009

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas, Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, bertujuan untuk melaksanakan fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan menunjang pelaksanaan kegiatan bantuan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin;
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, bertujuan untuk pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak;
- 3) Program Pembinaan Anak Terlantar, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bagi anak terlantar menuju kemandirian anak terlantar dan anak jalanan;
- 4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, bertujuan untuk mendayagunakan para penyandang cacat dan eks trauma;
- 5) Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo, bertujuan untuk pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo;

- 6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, bertujuan untuk meningkatkan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial masyarakat; dan
- 7) Program Penanggulangan Bencana/Bencana Alam, bertujuan untuk pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana/bencana alam.

14. Ketenagakerjaan

a. Kondisi Umum

Pada Tahun 2007, dari jumlah penduduk mencapai 1.231.872 (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua) orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 665.438 (enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus tiga puluh delapan) orang dan penduduk yang bekerja tercatat 628.801 (enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu) orang sedangkan jumlah pencari kerja sebanyak 36.637 (tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh) orang. Kondisi tersebut pada beberapa tahun ke depan cenderung berubah dengan tingkat penyerapan kerja yang semakin menurun dan angkatan kerja yang semakin meningkat sehingga angka pencari kerja semakin meningkat. Dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia, pekerja asal Kebumen umumnya masih rendah. Hal tersebut dilihat dari tingkat pendidikannya maupun tingkat ketrampilannya, sehingga memiliki posisi tawar yang rendah dan kurang memiliki daya saing untuk penempatan ke luar daerah maupun luar negeri.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja yang telah dilakukan diantaranya dengan dengan meningkatkan upah standar Minimum Kabupaten pada Tahun 2007 menjadi Rp.507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) dan fasilitasi perlindungan sosial.

- b. Permasalahan
 - 1) banyaknya jumlah pengangguran dan setengah penganggur;
 - 2) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan
 - 3) rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
- c. Arah Kebijakan
 - 1) meningkatkan perluasan dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran;
 - 2) memfasilitasi peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan
 - 3) mengembangkan sistem hubungan industrial dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
- d. Sasaran
 - 1) tersedianya lapangan kerja untuk pencari kerja;
 - 2) terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan
 - 3) terwujudnya peningkatan perlindungan, hak-hak tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis.
- e. Program
 - 1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, bertujuan untuk mendorong perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang produktif serta mobilisasi tenaga kerja dalam rangka mencukupi kebutuhan pasar kerja lokal, regional maupun global.
 - 2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan, keahlian, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan formal, pelatihan tenaga kerja.
 - 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja, bertujuan untuk menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis melalui peningkatan pelaksanaan fungsi dan peran hubungan industrial bagi pelaku proses produksi barang dan jasa.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a. Kondisi Umum

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen mencakup pengusaha pada sektor industri dan perdagangan. Pada Tahun 2007 jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada sektor Industri mencapai 36.351 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu) unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 88.434 (delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat) orang dengan nilai produksi sebesar Rp.403.435.000.000,00 (empat ratus tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah). Sedangkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sektor perdagangan mencapai 7.036 (tujuh ribu tiga puluh enam) unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 28.000 (dua puluh delapan ribu) orang dengan nilai produksi sebesar Rp.559.539.000.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Jumlah koperasi di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2007 sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) unit sedangkan jumlah anggota tercatat 69.129 (enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan) orang dengan jumlah total asset mencapai Rp.53.035.000.000,00 (lima puluh tiga milyar tiga puluh lima juta rupiah) dan Sisa Hasil Usaha mencapai Rp.88.138.000.000,00 (delapan puluh delapan milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah)

b. Permasalahan

- 1) rendahnya upaya pengembangan kemampuan kewirausahaan dan pengembangan produk unggulan daerah;
- 2) belum optimalnya dukungan dari berbagai sektor terkait peningkatan kondusitas iklim usaha;
- 3) lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Koperasi; dan
- 4) rendahnya kapasitas kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

c. Arah Kebijakan

- 1) meningkatkan kemampuan jiwa kewirausahaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi untuk meningkatkan produktifitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- 2) meningkatkan dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan iklim usaha kondusif melalui koordinasi dan sinkronisasi program;
- 3) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan; dan
- 4) meningkatkan kapasitas Kelembagaan Koperasi melalui pelatihan dan pembinaan.

d. Sasaran

- 1) meningkatnya kemampuan kewirausahaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
- 2) meningkatnya dukungan dari berbagai pihak untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- 3) meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi; dan
- 4) meningkatnya kapasitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

e. Program

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, bertujuan untuk mengembangkan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga pengetahuan dan sikap kewirausahaan semakin berkembang, produktivitas meningkat, jumlah wirausahaan meningkat dan ragam produk unggulan semakin berkembang;
- 2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, non diskriminatif bagi

kelangsungan dan peningkatan kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal; dan
- 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sebagai wadah kepentingan bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif sehingga citra koperasi menjadi semakin baik.

16. Penanaman Modal

a. Kondisi Umum

Dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, peran dunia usaha swasta masih sangat diperlukan. Hal tersebut disadari karena sumber pembiayaan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sangat terbatas untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Peran swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten diperlukan dalam kerangka pengembangan investasi.

Untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke Kebumen telah dilakukan diupaya-upaya antara lain :

- 1) penyusunan Profil/ peluang investasi;
- 2) pemasaran peluang investasi dalam *Central Java Infrastructure Business Forum* dan Forum Kerjasama Regional Barlingmascakeb;
- 3) peningkatan pelayanan perizinan satu atap;
- 4) pembentukan Tim Percepatan Investasi;
- 5) peningkatan sarana dan sarana pendukung kegiatan investasi; dan

6) pemberian insentif / kemudahan yang cukup menarik.

b. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan di bidang penanaman modal adalah :

- 1) kurang optimalnya pelayanan masyarakat di bidang investasi;
- 2) kurangnya dukungan infrastruktur penunjang kegiatan investasi;
- 3) rendahnya minat dan realisasi investasi; dan
- 4) terdapat tumpang tindih penanganan kegiatan investasi.

c. Arah Kebijakan

- 1) memperbaiki pelayanan publik di bidang investasi sesuai dengan standar pelayanan melalui menerapkan konsep Pelayanan Perizinan Satu Atap (*One Stop Service*);
- 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung investasi;
- 3) melakukan kajian peluang investasi sesuai dengan potensi daerah; dan
- 4) melakukan promosi investasi dan kerjasama yang terkoordinasi.

d. Sasaran

Sasaran peningkatan penanaman modal daerah adalah :

- 1) terpenuhinya pelayanan masyarakat/dunia usaha dalam bidang investasi;
- 2) meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung investasi;
- 3) meningkatnya minat investor serta realisasi investasi; dan
- 4) tersedianya identifikasi profil peluang investasi dan meningkatnya akses informasi bidang investasi.

e. Program

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, bertujuan untuk melakukan promosi potensi unggulan daerah serta fasilitasi kerjasama investasi dalam rangka menciptakan peluang investasi serta menarik minat investor.

17. Kebudayaan

a. Kondisi Umum

Secara umum kebudayaan di Kabupaten Kebumen diwarnai dengan nilai Islami mengingat Kabupaten Kebumen mayoritas penduduknya menganut agama Islam, di mana salah satu tempat yang masih mempunyai nilai budaya Islami yang cukup tinggi yaitu Pondok Pesantren Somalangu dan sekitarnya dan berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Seni dan Budaya pada Tahun 2007 disimpulkan bahwa lokasi tersebut akan diarahkan menjadi Obyek Cagar Budaya.

Di sisi lain keragaman kesenian tradisonal di Kabupaten Kebumen dimiliki setiap kecamatan. Ada yang mempunyai kesenian tradisional berupa kuda lumping dan janjaneng. Salah satu upaya yang telah dilaksanakan untuk mempromosikan kebudayaan tersebut dilakukan melalui media Anjungan Pusat Rekreasi Pameran dan Pariwisata Jawa Tengah dan kerjasama dengan pihak ketiga.

b. Permasalahan

Untuk menjaga kelestarian budaya dan meningkatkan promosi budaya tersebut, dijumpai ada beberapa permasalahan, antara lain :

- 1) kurang optimalnya pengelolaan dan pemeliharaan terhadap budaya yang menyebar dimasing-masing wilayah di Kabupaten Kebumen;
- 2) kurangnya pengembangan nilai budaya dan promosi budaya; dan
- 3) kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pelestarian budaya.

c. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap aset budaya Kabupaten Kebumen;
- 2) mengembangkan nilai budaya dan meningkatkan promosi kebudayaan melalui media yang ada; dan
- 3) mengembangkan pola kemitraan dengan dengan pihak ketiga berkaitan pengelolaan budaya.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai Urusan Kebudayaan pada Tahun 2009, sebagai berikut :

- 1) terwujudnya pengelolaan dan pemeliharaan terhadap aset budaya yang ada;
- 2) meningkatnya nilai budaya yang ada; dan
- 3) terwujudnya Pola Kemitraan dengan pihak ketiga.

e. Program

Program Urusan Kebudayaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009, meliputi :

- 1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan terhadap aset budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Kebumen yang letaknya menyebar dimasing-masing kecamatan;
- 2) Program Pengembangan Nilai Budaya, bertujuan untuk mengembangkan nilai budaya yang ada di Kabupaten Kebumen yang kemudian nantinya dapat menarik minat wisata;
- 3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, bertujuan untuk mengelola keanekaragaman budaya yang ada, sehingga dengan keanekaragaman budaya tersebut dapat dijadikan modal dasar dalam pembangunan urusan kebudayaan; dan
- 4) Program Pengembangan Kemitraan, bertujuan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dengan swasta ataupun antara pemerintah dengan masyarakat sekitarnya.

18. Kepemudaan dan Olahraga

a. Kondisi Umum

Secara umum pengelolaan bidang Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kebumen, terbagi menjadi dua antara lain :

- 1) kegiatan Pemuda dan Olahraga yang lingkupnya Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi

Porseni dan Lomba Olahraga antar siswa yang penyelenggaraannya rutinitas setiap tahun; dan

- 2) kegiatan Pemuda dan Olahraga yang lingkupnya Non Sekolah/ Umum dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen, dengan sasaran Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kebumen dan Pengurus Cabang Olahraga yang meliputi, antara lain: Sepakbola, Bola Voli, Bulutangkis, Gulat dan Atletik. Kedua pengelolaan olahraga ini bertujuan untuk membina kader/atlit dari awal (tingkat sekolah) sampai pada masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan prestasi kebumen di bidang pemuda dan olahraga.

b. Permasalahan

Untuk meningkatkan prestasi dan partisipasi dalam bidang pemuda dan olahraga, dijumpai ada beberapa permasalahan, antara lain :

- 1) masih kurangnya sarana prasarana olahraga sesuai dengan standar yang diperlukan; dan
- 2) masih kurangnya partisipasi pemuda, baik dalam organisasi kepemudaan dan dalam prestasi olahraga;

c. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
- 2) pembentukan dan pembinaan pengelola cabang olahraga; dan
- 3) pembinaan kepada pemuda melalui organisasi kepemudaan.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai Urusan Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2009, sebagai berikut :

- 1) terbangunnya sarana dan prasarana olahraga;
- 2) terbinanya pengelola cabang olahraga, terutama untuk cabang olahraga yang potensial berprestasi di Kabupaten Kebumen; dan

3) terbinanya organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Kebumen.

e. Program

Program Urusan Pemuda dan Olahraga yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009, meliputi :

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan, bertujuan untuk membangun sarana prasarana olahraga yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sesuai dengan standar;
- 2) Program peningkatan peran serta kepemudaan, bertujuan meningkatkan pemuda di Kabupaten Kebumen untuk berpartisipasi dalam wadah organisasi kepemudaan; dan
- 3) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga kepada masyarakat sekaligus melakukan pembinaan kepada pengurus cabang olahraga.

19. Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri

a. Kondisi Umum

Kondisi Kabupaten Kebumen ditinjau dari urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri relatif aman dan terkendali. Hal ini berkat upaya-upaya berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan segenap unsur masyarakat. Tahun 2007 dilewati dengan suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala desa di 431 (empat ratus tiga puluh satu) desa dan diselenggarakan melalui 4 (empat) tahap pemilihan. Proses demokrasi di tingkat desa ini berlangsung dengan aman, tertib dan lancar sehingga tidak merusak stabilitas daerah yang dapat mengganggu kondisi dan momentum pembangunan Kabupaten Kebumen. Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi momentum untuk kemajuan Kabupaten Kebumen ke depan, karena hal tersebut merupakan cerminan stabilitas keamanan wilayah yang dapat dipromosikan kepada investor maupun calon investor.

Di sisi lain, dalam menghadapi Pemilihan Presiden Tahun 2009, diperlukan kesiapan pendukungnya baik dari aspek pendataan maupun jaminan keamanan lingkungan, mengingat Daftar Pemilih Terdaftar sebanyak 941.921 (sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu) jiwa dari 962.546 (sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam) Pemilih Potensial dan jumlah Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di 503 (lima Ratus tiga) tempat, tentunya memerlukan perhatian dan kerjasama semua pihak untuk dapat mengawal pelaksanaan Pilgub ini dengan sukses.

b. Permasalahan

Tantangan pokok yang dihadapi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2009 dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas demi tercapainya stabilitas kesatuan bangsa dan politik dalam negeri antara lain :

- 1) masih kurangnya kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi gangguan kemanan dan kenyamanan lingkungan seperti kebakaran dan tindakan kriminal;
- 2) masih tingginya tingkat kriminalitas baik kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap sumber daya alam (pembalakan hutan, penjarahan ikan dengan listrik dan racun);
- 3) menurunnya rasa nasionalisme/kesadaran kehidupan berbangsa khususnya di kalangan generasi muda;
- 4) masih tingginya tingkat kejahatan (penyalahgunaan) narkoba, psikotropika dan minuman keras di kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa;
- 5) masih kurangnya tingkat kesadaran politik dan rendahnya etika berpolitik di kalangan masyarakat; dan
- 6) masih minimnya kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat akan bahaya bencana alam dan sosial, khususnya warga di sekitar daerah rawan bencana alam dan sosial.

c. Arah Kebijakan

- 1) peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan bahaya bencana alam;
- 2) menekan tingkat kriminalitas baik kejahatan konvensional dan khususnya kejahatan terhadap sumber daya alam (pembalakan hutan, penangkapan ikan dengan listrik dan racun);
- 3) peningkatan pemahaman akan pentingnya memperkuat kebangsaan dan cinta tanah air khususnya di kalangan pemuda;
- 4) peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya untuk menekan tingkat kejahatan (penyalahgunaan) narkoba, psikotropika dan minuman keras di kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa;
- 5) peningkatan pelayanan rehabilitasi korban narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, serta menekan aktivitas jaringan *supply* dan *demand* narkoba; dan
- 6) penguatan fondasi kerjasama antara aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial politik kemasyarakatan, untuk meningkatkan rasa kesadaran politik dan etika berpolitik di kalangan masyarakat.

d. Sasaran

Sasaran pokok yang akan dicapai Kabupaten Kebumen pada Tahun 2009 dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas demi tercapainya stabilitas kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatnya kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan mengantisipasi bahaya bencana alam;
- 2) menurunnya tingkat kriminalitas baik kejahatan konvensional dan khususnya kejahatan terhadap sumber daya alam (pembalakan hutan, penangkapan ikan dengan listrik dan racun);
- 3) meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat kebangsaan dan cinta tanah air khususnya di kalangan pemuda;

- 4) meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya untuk menekan tingkat kejahatan (penyalahgunaan) narkoba, psikotropika dan minuman keras di kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - 5) meningkatnya pelayanan rehabilitasi korban narkoba, sosialisasi bahaya narkoba, serta menekan aktivitas jaringan *supply* dan *demand* narkoba; dan
 - 6) menguatnya fondasi kerjasama antara aparat pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial politik kemasyarakatan, untuk meningkatkan rasa kesadaran politik dan etika berpolitik di kalangan masyarakat.
- e. Program
- 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan anggota Pemadam Kebakaran dalam menanggulangi korban kebakaran dan terlaksananya pengendalian keamanan lingkungan melalui posko dan Lapsida, Bakorinda/Satkorpulahtahsida/Kominda;
 - 2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, bertujuan untuk pengamanan Pemilihan Umum 2009 di Kabupaten Kebumen;
 - 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, bertujuan untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan, Nilai Nilai Kepahlawanan dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara bagi generasi muda, masyarakat dan pelajar;
 - 4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, bertujuan untuk meningkatkan kerukuman umat beragama, organisasi masyarakat dan persaudaraan bangsa;
 - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan melalui pembinaan Anggota Hansip Linmas Kecamatan/Desa/Kelurahan;

- 6) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, bertujuan untuk pencegahan peredaran penggunaan miras dan narkoba bagi masyarakat, pelajar, santri dan pemuda di Kecamatan se-Kabupaten Kebumen;
- 7) Program Pendidikan Politik Masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan etika berpolitik bagi Ormas, Orsos, perempuan dan masyarakat melalui penyuluhan dan terlaksananya sosialisasi Pilihan Legislatif dan Pilihan Presiden Tahun 2009; dan
- 8) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan tim kerja peringatan dini tsunami, aparat kecamatan/desa dan warga masyarakat rawan bencana, lokasi bencana, Tim *Search and Rescue* dan korban bencana alam, tercukupinya kebutuhan warga masyarakat yang kekurangan air bersih melalui droping air bersih serta merelokasi warga yang berada di daerah rawan bencana.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a. Kondisi Umum

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan pemerintahan umum tetap diarahkan pada reformasi birokrasi dengan fokus pada upaya-upaya peningkatan kinerja birokrasi pemerintah daerah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penerapan pemerintahan yang baik, antara lain:

- 1) melakukan sosialisasi dan koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- 2) menyelenggarakan sosialisasi dan penajaman reformasi birokrasi dan percepatan penerapan *Good Publik Governance* di daerah;
- 3) penataan kelembagaan, ketatalaksanaan aparatur dan sumber daya manusia aparatur; dan
- 4) pemetaan tentang praktik terbaik (*best practices*) penerapan *Good Publik Governance*, peningkatan pelayanan publik, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan, serta saran-saran tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya mengembangkan dan menerapkan etika dalam pelayanan publik, menyusun pedoman supervisi pelayanan publik; mulai diterapkannya pelayanan publik yang lebih baik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mulai diterbitkannya Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah; pelaksanaan lelang terbuka dan mulai dirintisnya *e-procurement* sebagai bagian dari akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur, Pemerintah Kabupaten Kebumen juga telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) pemberian gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil ;
- 2) dilakukannya penataan data/informasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) dilaksanakannya penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2005 dan penetapan formasi Tahun 2006 yang dilaksanakan pada Tahun 2007 secara profesional dan terbuka; dan
- 4) tersusunnya berbagai kajian di bidang Sumber Daya Manusia aparatur sebagai masukan pengambilan kebijakan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap birokrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, antara lain dicerminkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat, baik menyangkut prosedur, kepastian, tanggung jawab, moral petugas, serta masih terjadinya praktek pungli yang memperbesar biaya pelayanan, dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap sebagai penghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Untuk itu, pada Tahun 2009 pembangunan urusan pemerintahan umum diprioritaskan untuk melanjutkan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang mampu berperan sebagai fasilitator dan dinamisor penyelenggaraan pembangunan dan turut menciptakan iklim yang mendukung lancarnya proses pemerintahan dan pembangunan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberantas berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan kepada upaya-upaya: penerapan *reward* dan *punishment* dalam pembinaan pegawai; penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Umum; optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*e-services*) dalam pelayanan publik terutama di bidang administrasi kependudukan dan pemerintahan (*e-gov*). Selain prioritas di atas, pemerintahan daerah juga akan tetap melanjutkan berbagai upaya lainnya yang diperlukan dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sedangkan untuk kondisi umum kepegawaian, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen sebanyak 14.077 (empat belas

ribu tujuh puluh tujuh) orang. Dari jumlah tersebut apabila dilihat dari kualifikasi pendidikan, terdiri dari: 511 (lima ratus sebelas) orang atau 3,63% (tiga koma enam puluh tiga persen) berpendidikan Sekolah Dasar; 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) orang atau 6,88% (enam koma delapan puluh delapan persen) berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama; 3.703 (tiga ribu tujuh ratus tiga) orang atau 26,31% (dua puluh enam koma tiga puluh satu persen) berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; 3.725 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima) orang atau 26,46% (dua puluh enam koma empat puluh enam persen) berpendidikan Diploma II; 1.264 (seribu dua ratus enam puluh empat) orang atau 8,98% (delapan koma sembilan puluh delapan persen) berpendidikan Diploma III, 10 (sepuluh) orang atau 0,09% (nol koma nol sembilan persen) berpendidikan Diploma IV, 3.708 (tiga ribu tujuh ratus delapan) orang atau 26,31% (dua puluh enam koma tiga puluh satu persen) berpendidikan Sarjana serta 187 (seratus delapan puluh tujuh) orang atau 1,33% (satu koma tiga puluh tiga persen) berpendidikan Pasca Sarjana.

Untuk kebijakan penataan kepegawaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, baik mutasi maupun promosi dilaksanakan dengan berpedoman pada 3 (tiga) kriteria, yaitu :

- 1) profesionalisme dibidang tugasnya, memiliki integritas, loyalitas dan komitmen tinggi kepada institusi;
 - 2) memiliki kemampuan prima untuk melaksanakan tugas, wewenang serta tanggung jawab; dan
 - 3) harus memiliki etika moral yang terpuji.
- b. Permasalahan
- 1) masih kurangnya sarana prasarana aparatur sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan publik;
 - 2) masih kurangnya pemahaman pemerintah desa/kelurahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- 3) belum adanya regulasi pendukung di tingkat kabupaten sebagai akibat dari dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat yang baru; dan
- 4) belum optimalnya pengendalian kegiatan berkaitan dengan adanya beberapa penyerahan kewenangan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten.

Sedangkan untuk melaksanakan penataan kepegawaian baik dari aspek Manajemen Kepegawaian dan Sumber Daya Aparaturnya, dijumpai berbagai permasalahan, antara lain :

- 1) masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap kebutuhan yang diperlukan, yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat;
- 2) dampak dari kebijakan pemerintah pusat tentang rekrutment Pegawai Negeri Sipil, di mana salah satu syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus lulus Pra Jabatan dan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing; dan
- 3) Dengan adanya Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja baru, maka banyak para pejabat baru yang harus mengikuti diklat sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

c. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan bidang pemerintahan umum, kebijakan yang dilaksanakan pada Tahun 2009, sebagai berikut :

- 1) pengadaan sarana prasarana aparatur sebagai pendukung pelayanan publik;
- 2) melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 3) menyusun regulasi pendukung berkaitan dengan dengan kebijakan pemerintah pusat; dan
- 4) meningkatkan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan secara optimal.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan kepegawaian, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan memberikan kesempatan bagi para Pegawai Negeri Sipil dan pejabat struktural untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- 2) melaksanakan diklat pra jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat dan melaksanakan diklat struktural bagi para pejabat yang baru menduduki jabatan; dan
- 3) melaksanakan pembinaan kepegawaian dengan memberikan sanksi yang jelas dan penghargaan bagi pegawai yang mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi.

d. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2009, sebagai berikut :

- 1) terpenuhinya sarana prasarana aparatur pendukung pelayanan publik;
- 2) Pemerintah Desa/Kelurahan bisa memahami tentang sistem pengelolaan keuangan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Pemerintah Desa;
- 3) adanya regulasi baru sebagai pendukung kebijakan nasional; dan
- 4) pelaksanaan kegiatan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Adapun sasaran yang hendak dicapai Urusan Kepegawaian pada Tahun 2009, sebagai berikut :

- 1) meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Kebumen;
- 2) terlaksananya diklat pra jabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan terlaksananya diklat struktural bagi pejabat yang baru; dan
- 3) terwujudnya kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di kalangan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

e. Program

Program urusan Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009, meliputi :

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kerja aparatur pemerintah daerah dalam pelayanan publik;
- 2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, bertujuan untuk memfasilitasi pemerintahan desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan peningkatan kinerja kelurahan;
- 3) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, bertujuan untuk menyusun regulasi berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik termasuk di dalamnya sosialisasi Peraturan Daerah Baru;
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan jaminan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas;
- 5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, bertujuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, termasuk di dalamnya penyusunan regulasi pendukungnya; dan
- 6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, bertujuan untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan bantuan keuangan.

Sedangkan program-program urusan Kepegawaian yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009, meliputi :

- 1) Program Pendidikan Kedinasan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui jenjang pendidikan gelar ataupun non gelar;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, bertujuan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, pendidikan dan pelatihan teknis dan

fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, pengiriman peserta ujian dinas, ujian Penyesuaian Ijazah serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan gelar;

- 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, bertujuan untuk penyusunan rencana pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, seleksi penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil, penempatan Pegawai Negeri Sipil, penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil, pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah, pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi, proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, penataan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, penyusunan data formasi dan Daftar Urutan Kepegawaian, pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemkab Kebumen, pelaksanaan penetapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Kondisi Umum

Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 (dua puluh enam) Kecamatan, 11 (sebelas) Kelurahan dan 449 (empat ratus empat puluh sembilan) Desa. Jumlah penduduk miskin 376.760 (tiga ratus tujuh enam ribu tujuh ratus enam puluh) jiwa sedangkan rumah tangga miskin pada Tahun 2007 tercatat 168.612 (seratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua belas) kepala keluarga. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pendapatan, minimnya sarana dan prasarana, penambahan jumlah penduduk, tingginya tingkat pengangguran, masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, menurunnya daya beli, tingkat kesehatan masih rendah, dan berbagai keadaan rentan lainnya.

Dengan adanya program-program dari Pemerintah dalam mendukung penentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti dengan membuat kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin dengan beberapa harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kebumen. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain; perbaikan sarana dan prasarana umum yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat terutama masyarakat miskin, program penanggulangan kemiskinan, misalnya Program Pembangunan Kecamatan sampai dengan Tahun 2007 telah dilaksanakan di 15 (lima belas) Kecamatan yang tersebar di 267 (dua ratus enam puluh tujuh) desa dan mampu membangun jembatan sebanyak 70 (tujuh puluh) unit, sarana air bersih 4 (empat) unit, sarana irigasi 62.743 (enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga) Meter, Mandi Cuci Kakus 10 (sepuluh) unit, bangunan dan fasilitas pasar desa 19 (sembilan belas) unit, bendungan/cekdam 12 (dua belas) unit, rehabilitasi sekolah 10 (sepuluh) unit, rehabilitasi gedung kesehatan 1 (satu) unit, pembangunan talud sebanyak 26.708 (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan) Meter serta drainase sepanjang 23.365 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) Meter.

Di samping pembangunan yang berupa fisik tersebut, program penanggulangan kemiskinan juga berupa pemberian dana stimulan untuk masyarakat miskin, kegiatan tersebut melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan yang dilaksanakan di 94 (sembilan puluh empat) Kelurahan/Desa dan sampai saat ini telah terbentuk kelembagaan yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat sebanyak 94 (sembilan puluh empat) unit di masing-masing Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi program.

Dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang, merupakan wadah partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan dan masih perlu

untuk dioptimalkan, termasuk Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat. Di Kabupaten Kebumen pada Tahun 2007 terdapat 636 (enam ratus tiga puluh enam) unit Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat dan apabila diberdayakan akan mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin.

Dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan pedesaan, telah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu yang pada Tahun 2007 sebanyak 2.152 (dua ribu seratus lima puluh dua) Posyandu, Fasilitasi Teknologi Tepat Guna di 26 (dua puluh enam) Unit Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan dan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan pemantapan koordinasi keterpaduan program pemberdayaan masyarakat tersebut.

b. Permasalahan

Dengan memperhatikan beberapa kondisi tersebut diatas, masih terdapat permasalahan yang masih perlu ditindaklanjuti pada Tahun 2009 antara lain:

- 1) lemahnya kapasitas dan akses masyarakat pada sumber daya produktif dan masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam aplikasi teknologi tepat guna;
- 2) belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi dan berperan serta dalam mendukung pembangunan di pedesaan; dan
- 3) belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial dan ekonomi dalam menunjang pemberdayaan masyarakat.

c. Arah Kebijakan

Kebijakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Kebumen diarahkan pada upaya:

- 1) meningkatkan kemampuan dan keikutsertaan masyarakat miskin terhadap sumber daya (*resources*);

- 2) meningkatkan kebutuhan permukiman dan sanitasi yang layak dan sehat;
 - 3) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan menuju masyarakat mandiri;
 - 4) meningkatkan dan pengenalan Teknologi Tepat Guna serta pemanfaatannya;
 - 5) meningkatkan Sumber Daya Manusia, peran serta kelembagaan dalam pembangunan; dan
 - 6) meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
- d. Sasaran
- 1) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pembangunan;
 - 2) meningkatnya kualitas lembaga ekonomi masyarakat;
 - 3) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
 - 4) meningkatnya kinerja lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan; dan
 - 5) meningkatnya peran perempuan di pedesaan.
- e. Program
- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam berorganisasi, memanfaatkan penggunaan Teknologi Tepat Guna, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Mandiri untuk mendukung pemberdayaan masyarakat (perdesaan);
 - 2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, bertujuan untuk mengembangkan lembaga ekonomi pedesaan, meningkatkan akses informasi komunikasi dan eksistensi lembaga, melalui fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di pedesaan, pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Desa dan pembinaan pasar desa;
 - 3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, bertujuan untuk meningkatkan dan memotivasi masyarakat

melalui pembinaan terhadap kelompok masyarakat pembangunan desa dan pemberian stimulan pembangunan desa, dan fasilitasi Alokasi Dana Desa;

- 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparatur pemerintah desa dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan
- 5) Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, bertujuan meningkatkan peran perempuan di perdesaan melalui pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

23. Statistik

a. Kondisi Umum

Data statistik yang telah disusun merupakan kegiatan rutinitas yang harus disusun dan dipergunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan, antara lain : penyusunan Produk Domestik Regional Bruto, Kebumen Dalam Angka dan Profil Daerah, sedangkan data statistik lainnya yang sifatnya periodik (mempunyai jangka waktu tertentu) disusun berdasarkan kebutuhan, dengan adanya data statistik tersebut diharapkan perencanaan pembangunan lebih akurat dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

b. Permasalahan

Untuk meningkatkan akurasi data dibidang statistik, dijumpai ada beberapa permasalahan, antara lain :

- 1) banyaknya sumber data sehingga perlu ditetapkan data yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman;
- 2) kurang lengkapnya data statistik yang diperlukan untuk evaluasi pembangunan; dan
- 3) adanya perkembangan data-data baru, sehingga diperlukan *updating* data agar data tersebut bisa digunakan.

c. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik berkaitan dengan penyusunan data statistik yang diperlukan; dan
- 2) melakukan *updating*/penyusunan data berkaitan dengan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan.

d. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Urusan Statistik pada Tahun 2009 , yaitu tersusunnya data yang akurat, baik itu data yang sifatnya rutinitas maupun data sifatnya periodik.

e. Program

Program yang akan dilaksanakan, yaitu Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan tujuan untuk menyusun data-data baru yang diperlukan dan *updating* bagi data-data yang penyusunannya merupakan rutinitas.

24. Kearsipan

a. Kondisi Umum

Selama ini pelaksanaan bidang kearsipan di Kabupaten Kebumen, kegiatannya melekat dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi penataan dan dokumentasi arsip semuanya menjadi kewenangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan dokumentasi kearsipan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah akan dipindahkan ke Kantor Arsip, manakala arsip tersebut rata-rata sudah berumur 5 (lima) tahun lebih dan tentunya perpindahan arsip tersebut sudah melalui proses yang telah ditetapkan

b. Permasalahan

Untuk meningkatkan pelayanan dibidang kearsipan, dijumpai ada beberapa permasalahan, antara lain :

- 1) masih terdapat penataan arsip/dokumen yang tidak sesuai dengan standar ketentuan penyelamatan dokumen; dan

- 2) kurangnya informasi tentang penataan kearsipan pentingnya arsip/dokumen.

c. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) dilaksanakan penataan kearsipan dengan mengacu kepada standar penyelamatan dokumen;
- 2) melaksanakan sosialisasi tentang kearsipan; dan
- 3) meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai Urusan Kearsipan pada Tahun 2009 , sebagai berikut :

- 1) terlaksananya penataan kearsipan sesuai dengan ketentuan;
- 2) terlaksananya sosialisasi kearsipan; dan
- 3) meningkatnya kualitas sumber daya aparatur urusan kearsipan.

e. Program

Program Urusan Kearsipan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009, meliputi :

- 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, bertujuan untuk melindungi dan memilah-milah dokumen/arsip daerah yang telah ada sehingga tetap terjaga kondisinya; dan
- 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi (Sosialisasi), bertujuan untuk menyebarluaskan tentang pentingnya arsip dan meningkatkan sumber daya aparatur kearsipan.

25. Komunikasi dan Informatika

a. Kondisi Umum

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, transparansi dan akuntabel, maka salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Kebumen untuk urusan komunikasi dan informatika menciptakan yaitu melalui media komunikasi publik,

dengan mengelola Media Komunikasi Ratih TV, Radio In Fm dan *Press Centre*.

Sedangkan untuk mendukung Teknologi Informatika, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah membangun jaringan *On Line*, untuk kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk Kecamatan baru terbangun sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan dan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah baru 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut mengelola anggaran besar.

b. Permasalahan

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang transparansi dan akuntabel, dijumpai permasalahan sebagai berikut :

- 1) masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung Ratih TV;
- 2) belum *On Line*-nya jaringan antar kecamatan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- 3) masih kurangnya Sumber Daya Aparatur berkaitan dengan pengelolaan teknologi Informatika.

c. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu :

- 1) melengkapi sarana prasarana Ratih TV yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- 2) membangun jaringan *On Line* antar kecamatan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan masterplan jaringan yang telah dibentuk; dan
- 3) meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan khusus bagi pengelola informatika.

d. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2009 , sebagai berikut :

- 1) tercukupinya sarana dan prasarana Ratih TV sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) terwujudnya jaringan On Line antar kecamatan dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 3) meningkatnya Sumber Daya Aparatur pengelola informatika.
- e. Program

Program Urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan pada Tahun 2009, meliputi :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, bertujuan untuk pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, pengadaan alat studio dan komunikasi, serta pengkajian dan pengembangan sistem informasi;
- 2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, bertujuan untuk Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, serta pengembangan media alternatif; dan
- 3) Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media, bertujuan untuk penyebarluasan informasi pembangunan daerah, informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

B. Kewenangan Urusan Pilihan

1. Pertanian

a. Kondisi Umum

Sektor pertanian merupakan sektor dominan di Kabupten Kebumen. Hal tersebut ditunjukkan dengan sumbangan yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen rata-rata selama 3 (tiga) tahun terakhir mencapai 39,48% (tiga puluh sembilan koma empat puluh delapan persen). Dari sisi tenaga kerja sektor pertanian menyumbang 45% (empat puluh lima persen), dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto cukup besar namun prosentsenya cenderung menurun. Hal tersebut menunjukkan

terdapat beberapa masalah mendasar yang menyebabkan sektor pertanian sulit untuk tumbuh lebih cepat.

Sumbangan sektor pertanian masih didominasi oleh sumbangan sub sektor tanaman pangan khususnya padi. Pada Tahun 2007 luas panen padi seluas 36.710 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh) Hektar dengan jumlah produksi 199.674 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh empat) Ton. Komoditas pertanian lainnya yang merupakan unggulan Kabupaten Kebumen adalah komoditas perkebunan berupa potensi tanaman kelapa pada Tahun 2007.

Sub sektor pertanian lainnya yang cukup memberikan alternatif pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat adalah sub sektor peternakan, khususnya sapi Peranakan Ongole. Dari sisi kualitas dan kuantitas sapi, Peranakan Ongole di Kebumen cukup menonjol untuk kawasan Jawa Tengah. Dari sisi teknologi maupun Sumber Daya Manusia untuk ketiga sub sektor tersebut umumnya sudah cukup memadai antara lain : inovasi yang terus-menerus dilakukan oleh para petani maupun peternak. Namun demikian secara umum masih perlu untuk ditingkatkan.

b. Permasalahan

- 1) rendahnya produktivitas pertanian yang disebabkan oleh sempitnya kepemilikan lahan, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya tingkat penguasaan teknologi , rendahnya kualitas bibit/ benih dan mahalnnya harga sarana produksi;
- 2) rendahnya tingkat kesejahteraan petani dan peternak yang disebabkan usaha yang dilakukan belum mencapai skala usaha yang ekonomis; dan
- 3) terbatasnya akses informasi petani terhadap pasar. Hal tersebut menyangkut akses informasi kebutuhan pasar serta kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan pasar.

c. Arah Kebijakan

- 1) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan daya dukung lahan melalui peningkatan penguasaan teknologi tepat guna, pemberdayaan kelompok petani maupun peternak;
- 2) meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak melalui bantuan modal dan pembinaan untuk mencapai skala usaha yang ekonomis; dan
- 3) meningkatkan akses informasi petani terhadap pasar untuk memperluas pangsa pasar serta memperoleh harga jual yang wajar.

d. Sasaran

- 1) meningkatnya produktivitas pertanian melalui peningkatan daya dukung lahan melalui peningkatan penguasaan teknologi tepat guna, pemberdayaan kelompok petani maupun peternak;
- 2) meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak melalui bantuan modal dan pembinaan untuk mencapai skala usaha yang ekonomis; dan
- 3) meningkatnya akses informasi petani terhadap pasar untuk memperluas pangsa pasar serta memperoleh harga jual yang wajar.

e. Program

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pendapatan petani serta meningkatkan kemampuan lembaga tani di Kabupaten Kebumen;
- 2) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan Kabupaten Kebumen yang akan dipasarkan;
- 3) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian pangan; meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, menyusun data base komoditas pertanian; meningkatkan mutu hasil panen; menurunkan angka kehilangan hasil, meningkatkan

produktivitas lahan kering, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembangunan pertanian, mewujudkan sentra-sentra pengembangan tanaman hortikultura, pengembangan sistem tunda jual di Kabupaten Kebumen;

- 4) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, meningkatkan sarana dan prasarana teknologi pertanian di Kabupaten Kebumen;
- 5) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian kelompok tani serta memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian di Kabupaten Kebumen;
- 6) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh pertanian dan meningkatkan kegiatan penyuluhan pertanian di Kabupaten Kebumen;
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, bertujuan untuk mengetahui masalah peternakan, memelihara kesehatan dan mencegah penyakit menular ternak serta memfasilitasi penanganan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Kebumen; dan
- 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, bertujuan untuk meningkatkan populasi dan menjaga kesehatan ternak, mendistribusikan bibit ternak kepada masyarakat serta meningkatkan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat di Kabupaten Kebumen.

2. Kehutanan

a. Kondisi Umum

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia, namun demikian masih sering diabaikan oleh berbagai kepentingan. Pertama, fungsi hutan sebagai penjaga

iklim dan tata air bagi ekosistem dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total hamparan daratan, namun demikian luas hutan Negara yang tercatat pada Kebumen Dalam Angka Tahun 2006 adalah 16.903,2 (enam belas ribu sembilan ratus tiga koma dua) Hektar atau 13,24% (tiga belas koma dua puluh empat persen) dari total luas Kabupaten Kebumen. Luasan hutan yang ada tersebut, tidak semuanya dalam kondisi optimal karena terjadi kerusakan yang sangat memprihatinkan sebagai akibat dari penjarahan yang tidak terkendali. Berdasarkan fungsi utamanya kawasan hutan di Kabupaten Kebumen terdiri dari hutan produksi atau Hutan Produksi Terbatas seluas 16.903,2 (enam belas ribu sembilan ratus tiga koma dua) Hektar.

Selain hutan negara, Kabupaten Kebumen memiliki potensi hutan rakyat / hutan hak yang cukup luas, di mana pada Tahun 2007 diperkirakan seluas 9.136 (sembilan ribu seratus tiga puluh enam) Hektar. Luas lahan sangat kritis di Kabupaten Kebumen seluas 1.507,17 (seribu lima ratus tujuh) Hektar, lahan kritis seluas 5.253,38 (lima ribu dua ratus lima puluh tiga koma tiga puluh delapan) Hektar, lahan agak kritis seluas 7.328,70 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh delapan koma tujuh puluh) Hektar, lahan berpotensi kritis seluas 20.438,81 (dua puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan koma delapan puluh satu) Hektar, dan lahan tidak kritis seluas 57.890,49 (lima puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh koma empat puluh sembilan) Hektar. Lahan kritis di Kabupaten Kebumen memerlukan perhatian dan penanganan yang serius agar tidak menimbulkan akibat negatif, seperti kekeringan yang berkepanjangan di musim kemarau dan bencana banjir pada musim penghujan.

Fungsi hutan kedua, adalah hutan sebagai sumber bahan baku untuk mendukung industri daerah, dari hasil hutan berupa kayu dari hutan negara maupun hutan rakyat untuk memenuhi kebutuhan kayu, dari hutan rakyat pada Tahun 2007 produksi kayu mencapai \pm 21.969,562 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh sembilan

koma lima ratus enam puluh dua) meterkubik per tahun. Fungsi hutan ketiga, adalah sebagai pusat konservasi kekayaan plasma nutfah dan berbagai spesies flora maupun fauna.

Berbagai upaya untuk menjaga dan mengembalikan fungsi hutan telah dilakukan, dari data Tahun 2007 menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir luas lahan kritis di Kabupaten Kebumen yang tertangani baru sebesar 11.151 (sebelas ribu seratus lima puluh satu) Hektar, hal ini dikarenakan kebutuhan dana untuk penanggulangan lahan kritis menurut Departemen Kehutanan Tahun 2002 diperlukan rata-rata Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Hektar lahan kritis atau Rp.294.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat milyar rupiah) total keseluruhannya.

Tantangan pembangunan kehutanan di Kabupaten Kebumen ke depan diprediksikan semakin besar. Pertama, kondisi perekonomian yang belum pulih 100% (seratus persen) yang bersamaan dengan besarnya permintaan bahan baku untuk industri dan bahan bangunan akan menambah tekanan masyarakat terhadap hutan. Kedua, dalam kurun waktu dua sampai dengan tiga tahun diprediksikan akan mengalami kemarau panjang karena perubahan siklus musim akan memperkecil kemampuan fungsi hutan dalam menjaga iklim mikro dan tata air ekosistem. Ketiga, ada kecenderungan negatif masyarakat dan para pelaku pembangunan terhadap upaya-upaya pembangunan kehutanan semakin kecil.

Untuk itu diperlukan upaya-upaya penanganan yang lebih intensif. Di samping tantangan, peluang untuk memanfaatkan potensi masyarakat dalam pembangunan kehutanan juga cukup besar, baik dalam hal potensi hutan rakyat, maupun keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan.

Pendekatan dan pola dalam pembangunan kehutanan perlu disempurnakan seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Pendekatan perencanaan secara terpadu, pelibatan masyarakat dan pembinaan industri hilir diharapkan mampu

mengembalikan fungsi hutan dalam menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat.

b. Permasalahan

Memperhatikan beberapa kondisi tersebut di atas, masih terdapat permasalahan yang masih perlu ditindaklanjuti pada Tahun 2009 antara lain :

- 1) lemahnya sistem informasi dan perencanaan pembangunan kehutanan;
- 2) belum optimalnya pemanfaatan hutan dikarenakan masih rendahnya penerimaan iuran kehutanan, peredaran, dan pemasaran hasil hutan yang belum efisien;
- 3) tingginya tingkat kerusakan hutan dikarenakan rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya hutan serta kurang optimalnya fungsi tata air ekosistem diwilayah kehutanan, Daerah Aliran Sungai, *catchment area* waduk dikarenakan semakin luasnya lahan kritis;
- 4) rendahnya sarana dan prasarana kawasan pelestarian dan konservasi serta pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan sumber daya hutan; dan
- 5) rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia dan kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya kehutanan.

c. Arah Kebijakan

Kebijakan urusan kehutanan di Kabupaten Kebumen, diarahkan pada upaya-upaya :

- 1) meningkatkan sistem informasi dan perencanaan pengelolaan hutan;
- 2) meningkatkan optimalisasi pemanfaatan, peredaran hasil hutan serta pemasaran hasil hutan yang efisien;
- 3) meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan serta peningkatan fungsi hutan dalam memperbaiki tata air ekosistem;

- 4) meningkatkan sarana dan prasarana kawasan pelestarian dan konservasi serta peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan;
- 5) meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas kelembagaan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya kehutanan; dan
- 6) meningkatkan sistem perencanaan pembangunan kehutanan.

d. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan urusan kehutanan adalah :

- 1) terwujudnya peningkatan sistem informasi dan perencanaan pengelolaan hutan;
- 2) tercapainya peningkatan pemanfaatan hasil hutan serta efisiensi peredaran dan pemasaran hasil hutan;
- 3) terwujudnya peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat pembangunan kehutanan serta terwujudnya peningkatan fungsi hutan dalam memperbaiki tata air ekosistem;
- 4) terwujudnya peningkatan sarana prasarana kawasan pelestarian dan konservasi serta pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hutan;
- 5) terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kapasitas kelembagaan masyarakat disekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya kehutanan; dan
- 6) terwujudnya peningkatan sistem perencanaan pembangunan kehutanan.

e. Program

Program yang akan dilaksanakan pada pembangunan di urusan kehutanan Tahun 2009 adalah :

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, bertujuan untuk pengembangan hutan tanaman dengan terwujudnya hutan tanaman melalui kerjasama dengan perhutani, pengembangan hasil hutan non kayu untuk meningkatnya produktivitas lahan

melalui tanaman bawah tegakan dan pemanfaatan lahan bawah tegakan serta tertanaminya lahan kritis dengan tanaman penghijauan, terlaksananya budidaya tanaman bawah tegakan, optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk melayani Pemohonan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan dan didaptkannya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Kabupaten Kebumen, pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk Pembuatan Hutan Rakyat, pengkayaan serta pendataan turus jalan, pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan untuk pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Kebumen, dapat diwujudkan kemitraan/koperasi dalam pemasaran hasil hutan, pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan untuk penyelenggaraan pelatihan Pejabat Penerbit Surat Keterangan Surat Asal Usul Kayu;

- 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, bertujuan untuk mengkoordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan dengan terlaksananya koordinasi dengan Dinas/instansi terkait. Kabupaten Kebumen terlaksananya pertemuan Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kebumen dan Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan di 5 (lima) wibi penyuluh kehutanan lapangan se-Kabupaten Kebumen, pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan untuk menghasilkan bibit tanaman kehutanan Kabupaten Kebumen, penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata untuk mewujudkan penanaman dan pemeliharaan tanaman bakau, pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan untuk pendampingan/pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Kebumen serta pelaksanaan lomba penghijauan hutan swadaya masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan untuk penanaman *Multi Purpose Tree*

Species, penanaman cemara laut di wilayah pesisir serta pembuatan bibit cemara laut, terlaksananya pembuatan hutan rakyat, peningkatan produktivitas lahan milik desa dan penanaman turus jalan;

- 3) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan, bertujuan untuk penyusunan perda mengenai pengelolaan industri hasil hutan dan penyebar luasan akses layanan informasi hasil hutan; dan
- 4) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan, bertujuan untuk pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat dalam menyusun program penyuluhan kehutanan dan perencanaan hutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Kondisi Umum

Di bidang pertambangan umum, Kabupaten Kebumen memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup potensial. Dari hasil identifikasi sumber daya mineral diketahui ada 14 (empat belas) jenis komoditas bahan galian, yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis kelompok bahan bangunan, 2 (dua) jenis bahan galian kelompok bahan keramik dan 5 (lima) jenis kelompok mineral industri. Sumber daya mineral industri (mineral logam) sangat bervariasi, baik dalam sebaran, kualitas maupun kuantitas. Untuk bahan galian sebarannya beberapa wilayah Kabupaten Kebumen. Beberapa jenis bahan galian bahkan dapat dikategorikan sebagai unggulan, mengingat potensinya yang besar, memiliki karakteristik khas, nilai tambahnya tinggi, dan permintaan pasar yang besar, di antaranya pasir besi dan batu gamping.

Di bidang pengelolaan air bawah tanah, dalam rangka peningkatan konservasi terhadap air tanah telah dilakukan pemetaan Cekungan Air Tanah, yang meliputi Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten Cilacap, Banyumas dan Kebumen jumlah air tanah bebas diketahui lebih kurang 43.000.000 (empat puluh tiga juta) meter kubik per tahun pada litologi akuifer utama berupa endapan sungai dan

dataran pantai, pasir lempungan, endapan pematang pantai, pasir, sedangkan pada Cekungan Air Tanah pada litologi akuifer utama berupa endapan sungai dan dataran pantai, pasir lempungan, endapan pematang pantai, pasir jumlah air bawah tanah diketahui lebih kurang 65.000.000 (enam puluh lima juta) meter kubik per tahun. Dan Cekungan Air Tanah pada lintas Kabupaten Kebumen dan Purworejo pada litologi akuifer utama endapan dataran pantai dan sungai, pasir lempungan sampai kerikil. Cekungan Air Tanah pada formasi kalipucang; batu gamping pada Kabupaten Kebumen diketahui lebih kurang 49.000.000 (empat puluh sembilan juta) meter kubik per tahun

Di bidang energi, potensi sumber energi di Kabupaten Kebumen cukup besar dan beranekaragam. Namun demikian dalam pemanfaatannya masih banyak menggunakan bahan bakar minyak daripada bahan bakar lain. Sementara itu untuk sumber energi lain belum dimanfaatkan secara optimal, di antaranya angin, surya, gelombang laut, biomassa, biodiesel. Sehubungan dengan itu pemanfaatan dan diversifikasi energi di Kabupaten Kebumen memiliki peluang untuk terus dikembangkan.

Kondisi kelistrikan Kabupaten Kebumen, setelah dioperasikannya Pembangkit Listrik Tenaga Air Wadas Lintang, Pejengkolan, dan Sempor memiliki kapasitas pembangkit sebesar 124.000.000 (seratus dua puluh empat juta) kilo watt jam per tahun ditambah dari pasokan pembangkit lainnya yang ada di Jawa Tengah dapat memenuhi kebutuhan listrik terhadap kebutuhan sebesar 180.250.092 (seratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu sembilan puluh dua) kilo watt jam per tahun, dengan pelanggan terbanyak berada di kecamatan Kebumen sebanyak 21.800 (dua puluh satu ribu delapan ratus) pelanggan. Tingkat rasio elektrifikasi di Kabupaten Kebumen mencapai 65% (enam puluh lima persen).

b. Permasalahan

Secara ringkas permasalahan utama di urusan energi dan sumber daya mineral sebagai berikut :

- 1) belum optimalnya pengelolaan konservasi akibat belum sempurnanya database dan perencanaan yang efektif dan efisien di bidang geologi, pertambangan, air bawah tanah;
 - 2) rendahnya realisasi investasi di bidang pertambangan sebagai akibat kurang optimalnya upaya promosi, infrastruktur pendukung, dan perijinan investasi di bidang pertambangan;
 - 3) belum dimanfaatkannya potensi sumber daya mineral dan air bawah tanah secara optimal karena belum tersedianya data potensi dan pengembangan sumber daya mineral dan air bawah tanah;
 - 4) penurunan kualitas lingkungan (bencana alam geologi berupa tanah longsor, banjir, gempa bumi tektonik, kekeringan) yang disebabkan oleh tidak tertibnya kegiatan pertambangan dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya bencana tersebut;
 - 5) banyaknya pelanggaran oleh pelaku usaha pertambangan dan pelaku industri pengguna air bawah tanah;
 - 6) belum tersedianya energi listrik bagi masyarakat daerah terisolir dan rendahnya jumlah masyarakat yang mendapat aliran listrik;
 - 8) belum tersedianya data potensi dan pengembangan sumber tenaga listrik; dan
 - 9) banyaknya penyimpangan pemanfaatan Bahan Bakar Minyak dan tenaga listrik pada masyarakat dan pelaku usahannya.
- c. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) meningkatkan kualitas konservasi geologi, pertambangan dan air bawah tanah melalui penyempurnaan database dan perencanaan yang efektif dan efisien di bidang geologi, pertambangan, air bawah tanah;

- 2) meningkatkan investasi di bidang pertambangan melalui pelayanan informasi dan promosi potensi bahan galian dan hasil kegiatan pertambangan;
- 3) menyediakan data potensi dan pengembangan sumber daya mineral dan air bawah tanah;
- 4) mencegah penurunan kualitas lingkungan melalui pengawasan dan penertiban dan upaya mitigasi terhadap kemungkinan munculnya bencana;
- 5) mencegah terjadinya degradasi lingkungan akibat pemanfaatan bahan galian dan air bawah tanah;
- 6) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif sebagai energi listrik;
- 7) menyediakan sarana prasarana ketenagalistrikan bagi daerah terisolir; dan
- 8) menyusun database dan perencanaan pengembangan ketenagalistrikan.

d. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan urusan energi dan sumber daya mineral adalah :

- 1) tersedianya database dokumen perencanaan yang aktual dan akurat di bidang geologi, pertambangan, air bawah tanah dan energi secara detail, untuk kepentingan penataan wilayah dan konservasi geologi, pertambangan dan air bawah tanah;
- 2) tercapainya peningkatan kegiatan investasi di bidang pertambangan;
- 3) terwujudnya inventarisasi dataa potensi dan pengembangan sumber daya mineral dan air bawah tanah;
- 4) terwujudnya ketertiban kegiatan pertambangan dan pemanfaatan air bawah tanah serta mitigasi terhadap kemungkinan munculnya bencana alam;
- 5) terwujudnya cara penambangan yang baik dan benar serta penggunaan air bawah tanah sesuai konservasi lingkungan;

- 6) terpenuhinya kebutuhan energi listrik yang bersumber dari pemanfaatan energi alternatif bagi masyarakat terisolir;
- 7) tersedianya sarana prasarana ketenagalistrikan bagi daerah terpencil dan belum berlistrik; dan
- 8) terlaksananya inventarisasi dan pemanfaatan potensi energi listrik (mikrohidro, surya, biodiesel, diesel dan tenaga angin).

e. Program

Guna pencapaian sasaran dimaksud program yang akan ditempuh adalah :

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, bertujuan untuk pengembangan jaringan listrik atau Listrik Penerangan Jalan Umum yaitu mewujudkan perataan Listrik Penerangan Jalan Umum secara proporsional sampai tingkat desa dan terpeliharanya Listrik Penerangan Jalan Umum sehingga keamanan lingkungan dapat ditingkatkan;
- 2) Program Perencanaan Tata Ruang, bertujuan untuk penyusunan rencana teknis ruang kawasan serta pemetaan geologi tata lingkungan di Kabupaten Kebumen;
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, bertujuan untuk Penyusunan Raperda Tentang Pertambangan di Kabupaten Kebumen sehingga mewujudkan pemanfaatan potensi tambang secara optimal dan efisien;
- 4) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan, bertujuan untuk pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat termasuk pertambangan tanpa izin serta pembinaan usaha pertambangan rakyat, monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan pertambangan rakyat sebagai upaya pengawasan dan pengendalian terhadap lokasi penambangan di Kabupaten Kebumen, penyusunan profil dan pedoman teknis pengelolaan sumber daya mineral di Kabupaten Kebumen;

- 5) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kelistrikan dan Migas, bertujuan untuk pengembangan/perluasan jaringan listrik pedesaan, koordinasi pengembangan ketenagalistrikan, perencanaan jaringan listrik pedesaan.

4. Pariwisata

a. Kondisi Umum

Dengan dukungan 8 (delapan) obyek wisata kinerja Pariwisata di Kabupaten Kebumen dapat dikatakan cukup menonjol untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Pada Tahun 2007 tercatat jumlah pengunjung sebesar 394.047 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh tujuh) orang dengan pendapatan total mencapai Rp.1.027.297.290,00 (satu milyar dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Dilihat dari sisi pengunjung maupun pendapatan relatif konstan, namun dalam jangka panjang ada kecenderungan mulai menurun. Hal ini disebabkan perodesasi dari produk yang ditawarkan umumnya telah memasuki tahap kedewasaan sehingga mulai cenderung mengalami kemunduran. Di samping itu faktor persaingan cukup mempengaruhi terjadinya penurunan. Beberapa upaya dilakukan untuk mempertahankan tapi nampaknya cukup berhasil, namun dalam jangka panjang perlu diwaspadai kecenderungan yang semakin menurun. Untuk itu perlu penciptaan strategi baru berupa diversifikasi produk melalui pembangunan obyek wisata baru maupun penciptaan brand image untuk mendorong peningkatan kinerja pariwisata

b. Permasalahan

- 1) belum optimalnya upaya promosi serta terlaksananya analisis kebutuhan pasar pariwisata;
- 2) rendahnya kualitas sarana prasarana pendukung kepariwisataan; dan
- 3) belum optimalnya jaringan kemitraan antara pemerintah dan swasta.

c. Arah Kebijakan

- 1) meningkatkan citra Kebumen sebagai Daerah Tujuan Wisata unggulan melalui kegiatan pemasaran pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan;
- 2) meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung kepariwisataan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengunjung; dan
- 3) meningkatkan jaringan kemitraan dengan swasta dan masyarakat untuk mewujudkan suasana yang kondusif bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kebumen.

d. Sasaran

- 1) tercapainya citra Kebumen sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata unggulan di Jawa Tengah bagian Selatan;
- 2) meningkatnya kualitas sarana prasarana pendukung kepariwisataan; dan
- 3) meningkatnya kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat.

e. Program

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, bertujuan untuk meningkatkan informasi potensi kepariwisataan secara lintas wilayah ke pasar pariwisata potensial;
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, bertujuan untuk meningkatkan potensi keunikan lokal, budaya masyarakat dan alam untuk menjadi atraksi wisata, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata serta pengelolaan manajemen produk pariwisata; dan
- 3) Program Pengembangan Kemitraan, bertujuan untuk mengembangkan jaringan kemitraan dan kerjasama antar kawasan wisata melalui perkuatan koordinasi, kerjasama antar institusi swasta dan lembaga pemerintah.

5. Kelautan dan Perikanan

a. Kondisi Umum

Dengan memiliki batas pantai sepanjang kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) Kilometer menjadikan Kabupaten Kebumen memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar. Potensi laut yang besar selama ini belum ditangani secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya ketrampilan nelayan serta kurangnya sarana prasarana perikanan laut antara lain berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan, armada kapal dan alat tangkap. Terdapat beberapa Tempat Pelelangan Ikan yang potensial antara lain Tempat Pelelangan Ikan Pasir, Tempat Pelelangan Ikan Menganti dan Tempat Pelelangan Ikan Argopeni. Dengan dukungan prasarana yang ada telah mampu diambil potensi laut berupa ikan segar dari berbagai jenis sebesar 264.133,18 (dua ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga koma delapan belas) ton per tahun.

Dari sub sektor perikanan darat terdapat dukungan Sumber Daya Alam yang cukup besar antara lain potensi air tawar yang berupa 2 (dua) waduk besar ,sungai-sungai dan genangan yang akan menjadi sumber untuk pengembangan perikanan darat.

b. Permasalahan

- 1) belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana perikanan laut;
- 2) rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia dan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya kelautan; dan
- 3) lemahnya akses informasi pasar.

c. Arah Kebijakan

- 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan laut untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan;
- 2) meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya kelautan; dan

- 3) meningkatkan akses informasi pasar serta membangun jaringan pasar yang efisien untuk memperoleh harga jual yang wajar.

d. Sasaran

- 1) meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan laut untuk mendukung pengelolaan sumber daya kelautan;
- 2) meningkatnya kemampuan Sumber Daya Manusia dan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya kelautan; dan
- 3) meningkatnya akses informasi pasar serta membangun jaringan pasar yang efisien untuk memperoleh harga jual yang wajar.

e. Program

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan, bertujuan untuk mengembangkan bibit ikan unggul dengan menyempurnakan Balai Benih Ikan, menyediakan sarana/prasarana operasional Balai Benih Ikan dan tambak dinas, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan dan pembinaan serta pengembangan perikanan;
- 2) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, bertujuan untuk pembinaan kelompok nelayan pengolah dan bakul ikan di Wilayah Pesisir serta mengembangkan usaha melalui bantuan modal bagi kelompok nelayan;
- 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap, bertujuan untuk pengembangan perikanan tangkap melalui pembangunan tempat pelelangan ikan, rehabilitasi rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan, pengembangan sarana alat tangkap, penyusunan *Detail Engineering Design* Pelabuhan Pendaratan Ikan serta pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; dan
- 4) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, bertujuan untuk pengamanan produksi dan pemasaran ikan di Tempat Pelelangan Ikan se-Kabupaten Kebumen dan kampanye gemar makan ikan.

6. Perdagangan

a. Kondisi Umum

Sektor Perdagangan di Kebumen sebagian besar didominasi oleh transaksi serta distribusi komoditas pertanian dan pertambangan. Sebagian kecil hasil industri dan barang konsumsi yang bersifat pabrikan yang berasal dari luar daerah. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kabupaten Kebumen sebagai daerah agraris di bagian selatan Jawa Tengah. Kinerja yang dicapai oleh sektor perdagangan diperoleh dengan dukungan infrastruktur yang ada antara lain jaringan jalan dan pusat perdagangan berupa swalayan, pasar daerah dan pasar desa maupun kios-kios di pedesaan.

Kinerja sektor perdagangan dapat dilihat dari sumbangannya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2007 sebesar Rp.290.671.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh milyar enam ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan Tahun 2008 diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen).

b. Permasalahan

- 1) belum efisiensi dan efektifnya sistem distribusi barang produk hasil maupun barang kebutuhan masyarakat;
- 2) belum optimalnya usaha perlindungan konsumen;
- 3) belum optimalnya kinerja perdagangan komoditas produk unggulan Kebumen; dan
- 4) rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendukung perdagangan antara lain pasar-pasar daerah maupun jaringan jalan menuju sentra produksi.

c. Arah Kebijakan

- 1) meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa hasil produk dan kebutuhan masyarakat Kebumen;
- 2) meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui pengawasan barang beredar;

- 3) meningkatkan kinerja perdagangan produk unggulan Kebumen keluar daerah untuk memperluas pasar; dan
 - 4) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung perdagangan antara lain pasar-pasar daerah dan jaringan jalan menuju pusat produksi komoditas unggulan.
- d. Sasaran
- 1) meningkatnya efisiensi distribusi barang dan jasa hasil produk maupun kebutuhan pokok masyarakat Kebumen;
 - 2) meningkatnya upaya perlindungan konsumen melalui pengawasan barang beredar dan pembinaan;
 - 3) meningkatnya kinerja perdagangan produk unggulan; dan
 - 4) meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendukung perdagangan.
- e. Program
- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, bertujuan untuk melindungi konsumen dari barang-barang tidak layak konsumsi/pakai di pasaran, pengawasan tera di pasar, mensosialisasikan kebijakan cukai dan perijinan hasil tembakau dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta memenuhi kelengkapan sarana prasarana pendukung perdagangan;
 - 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dunia usaha dalam memperoleh perizinan, menyebarluaskan informasi harga bahan pokok dan pemberian subsidi sembako, meningkatkan pengembangan pasar lelang produk ke pasar regional serta meningkatkan pengembangan informasi investasi, produksi dan pasar nasional/internasional;
 - 3) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, bertujuan untuk menertibkan dan meningkatkan kesadaran pedagang kaki lima dan asongan terhadap tata tertib dan Perda Kebumen.

7. Industri

a. Kondisi Umum

Industri di Kabupaten Kebumen sebagian besar masih didominasi Industri Kecil dan Rumah Tangga, yang umumnya masih bersifat sederhana baik dari sisi pengelolaan, teknologi produksi maupun pemasarannya. Perkembangan kinerja sektor industri di Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri, nilai produksi dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pada Tahun 2007 jumlah industri mencapai 36.351 (tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu) unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 88.434 (delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat) orang dan nilai produksi sebesar Rp. 403.435.000.000,00 (empat ratus tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).

b. Permasalahan

- 1) rendahnya penyerapan teknologi produksi sehingga menyebabkan rendahnya daya saing produk;
- 2) kurangnya akses informasi pasar;
- 3) lemahnya dukungan pemodal; dan
- 4) lemahnya struktur industri, kurangnya keterpaduan program antar sektor, industri hulu dan hilir.

c. Arah Kebijakan

- 1) meningkatkan penyerapan teknologi produksi melalui serangkaian inovasi pada klaster industri potensial;
- 2) meningkatkan akses informasi pasar untuk memperoleh data yang akurat;
- 3) meningkatkan akses permodalan; dan
- 4) meningkatkan keterpaduan antara industri hulu dan hilir untuk memperkuat struktur industri.

d. Sasaran

- 1) meningkatnya penyerapan teknologi produksi melalui penerapan inovasi pada klaster industri potensial;

- 2) terbukanya akses informasi pasar yang luas bagi komoditas produk Kebumen;
- 3) meningkatnya akses permodalan; dan
- 4) meningkatnya keterpaduan penyediaan bahan baku.

e. Program

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi, bertujuan agar terciptanya perlindungan hasil karya cipta rekayasa mesin pengolahan produk maupun non mesin; dan
- 2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, bertujuan untuk memfasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya sehingga meningkatnya pengetahuan mutu produk industri hasil pertanian.

8. Ketransmigrasian

a. Kondisi Umum

Penyelenggaraan program transmigrasi yang dilakukan pemerintah daerah pada era otonomi daerah harus melalui kerjasama. Dengan adanya kerjasama tersebut masing-masing pemerintah daerah baik pemerintah daerah pengirim maupun penerima mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan transmigrasi baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya.

b. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan urusan ketransmigrasian adalah rendahnya jalinan komunikasi antara daerah pengirim dan daerah penerima transmigran. Terdapat beberapa hambatan baik dari aspek ekonomi maupun sosial budaya dalam pelaksanaan program transmigrasi. Hal tersebut mengingat terdapat adanya perbedaan kultur masyarakat antara daerah pengirim maupun penerima.

c. Arah Kebijakan

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi maka arah kebijakan yang diterapkan adalah peningkatan jalinan komunikasi antara daerah pengirim dan daerah penerima transmigran, agar berbagai hambatan baik secara ekonomi maupun sosial budaya dapat diatasi.

d. Sasaran

Sasaran umum yang hendak dicapai adalah terjalinnya hubungan komunikasi yang optimal antara daerah pengirim dan daerah penerima agar berbagai hambatan baik yang bersifat ekonomi maupun sosial budaya dapat diatasi terutama dengan fokus pada pengembangan daerah transmigrasi.

e. Program

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi bertujuan untuk menjalin komunikasi antara daerah pengirim dan daerah penerima agar hambatan-hambatan baik aspek ekonomi maupun sosial budaya dapat diatasi dengan fokus pada pengembangan daerah transmigran lokal.